



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis AkruaI dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
15. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Banjar.
16. Kebijakan Akuntansi terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
17. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal

dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

18. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
21. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
22. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
23. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

32. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
39. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
40. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
41. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
42. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
43. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
44. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

45. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
46. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPD;
- b. Sistem Akuntansi PPKD; dan
- c. BAS.

Pasal 3

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 24) dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 5 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 JANUARI 2019

SISTEM AKUNTANSI SKPD
 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.
- b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR)
- c. Bukti Memorial
- d. Bukti Pembayaran
- e. Surat Tanda Setoran (STS)
- f. Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

- a. Perlakuan atas piutang dari pendapatan yang dalam aplikasi dikategorikan sebagai pendapatan tanpa penetapan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.

Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian, sebagai berikut:

Piutang.....	xxx	
Pendapatan-LO.....		xxx

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Mencatat jurnal balik pendapatan-LO atas piutang yang sudah diakui tahun sebelumnya

Pendapatan-	xxx	
LO.....		xxx
Piutang		

Mencatat penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan atas pendapatan-LO yang telah diakui tahun sebelumnya:

Kas di bendahara	xxx	
penerimaan.....		xxx
Pendapatan –		
LO.....		
Perubahan-	xxx	
SAL.....		xxx
Pendapatan-		
LRA.....		

Mencatat penyetoran kas oleh Bendahara Penerimaan atas pendapatan-LO yang telah diakui tahun sebelumnya ke Kas daerah:

R/K PPKD	xxx	
.....		xxx
Kas di bendahara penerimaan		
.....		

Mencatat penerimaan kas langsung di Kas Daerah atas pendapatan-LO yang telah diakui tahun sebelumnya:

R/K	xxx	
PPKD.....		xxx
Pendapatan-		

LO.....	
Perubahan-	xxx
SAL.....	xxx
Pendapatan-	
LRA.....	

b. Perlakuan atas piutang dari pendapatan yang dalam aplikasi dikategorikan sebagai pendapatan dengan penetapan:

Pada saat diterbitkan surat ketetapan atas suatu pendapatan atau timbulnya hak atas suatu pendapatan, PPK-SKPD melakukan jurnal sebagai berikut:

Piutang.....	xxx
Pendapatan-LO.....	xxx

Mencatat penerimaan kas oleh bendahara penerimaan atas pendapatan tersebut:

Kas di bendahara	xxx
penerimaan.....	xxx
Piutang	
.....	
Perubahan-	xxx
SAL.....	xxx
Pendapatan-	
LRA.....	

Mencatat penyetoran kas oleh bendahara penerimaan atas pendapatan tersebut ke Kas daerah:

R/K PPKD	xxx
.....	xxx
Kas di bendahara penerimaan	
.....	

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan tersebut dilakukan langsung di Kas Daerah:

R/K PPKD	xxx
.....	xxx
Piutang	
.....	
Perubahan-	xxx

SAL.....	xxx
Pendapatan-	
LRA.....	

- c. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar	xxx	
Tagihan.....		Xxx
Tagihan		
Pinjaman.....		

- d. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas umur piutang.

Beban Penyisihan	xxx	
Piutang.....		Xxx
Penyisihan		
Piutang.....		

- e. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan

Penyisihan	xxx	
Piutang.....	xxx	
Beban Penyisihan		
Piutang.....		
Piutang.....		xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan	xxx	
Piutang.....		
Piutang.....		xxx
....		

- f. Mencatat Penerimaan Kas atas Piutang yang telah dihapusbukukan
- Jika piutang yang telah dihapuskan dapat diterima kembali maka akan dijurnal sebagai berikut.

Kas di bendahara	xxx	
penerimaan.....		xxx
Pendapatan –LO		
Perubahan-SAL.....	xxx	
Pendapatan-		xxx
LRA.....		

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan. Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.

1. Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

a. Penyimpan Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

d. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

- Bukti Belanja Persediaan
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Berita Acara *Stock Opname* Akhir Tahun
- SP2D LS
- Bukti Pengeluaran Barang
- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Inventarisasi Persediaan
- Laporan Persediaan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:

a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

1) Pada awal tahun

Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan.....	xxx	
		xxx
Persediaan.....		
.....		

2) Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD atau bukti pengeluaran/kwitansi, PPK-SKPD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran:

Beban Persediaan.....	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran.....		xxx

b. Pengadaan dengan mekanisme LS

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan mekanisme LS melalui BUD:

Beban Persediaan.....	xxx	
Utang Beban.....		xxx

Utang Beban.....	xxx	
R/K PPKD.....		xxx

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan.

4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan

Persediaan.....	xxx	
Beban		xxx
Persediaan.....		

b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

- 1) Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan.
- 2) Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/*Invoice*, PPK-SKPD akan mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaan.....	xxx	
Kas di Bendahara		xxx
Pengeluaran.....		

3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan

Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan

Beban Persediaan.....	xxx	
Persediaan.....		xxx

4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan,.

Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal ditambah Pembelian dikurang Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

1. Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

a. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran bertugas memberikan otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap, pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset Tetap.

b. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

e. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

f. BUD

Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST)/Tagihan Pihak III
- SP2D LS
- SPJ
- Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
- Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
- Berita Acara Pelepasan Aset Tetap
- Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap
- Laporan Barang Milik Daerah
- Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.

a. Penambahan

- 1) Berdasarkan Bukti Pengeluaran yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan

Belanja Modal.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- 2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....	xxx
RK PPKD.....	xxx

Belanja Modal.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin) berdasarkan BAST/ Tagihan/ dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap.....	xxx
Utang Pengadaan Aset	
Tetap.....	xxx

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap.....	xxx
R/K	
PPKD.....	xxx

Belanja Modal.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- b) Belanja Modal Termin

Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap tersebut tidak langsung 100% atau pembayarannya melalui proses termin. Sebagai contoh adalah pembangunan konstruksi Gedung, Bangunan, Jalan dan Jembatan. Berkaitan dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis tagihan belanja modal termin, maka pengisian kontrak tersebut wajib dilakukan. Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas, maka jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal Termin adalah sebagai berikut :

Kontruksi Dalam Pekerjaan.....	xxx
Utang Pengadaan Aset	
Tetap.....	xxx

Pembayaran Termin Pekerjaan (saat belum selesai 100%)
Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar angsuran penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Utang Pengadaan Aset Tetap.....	xxx
RK PPKD	xxx

Belanja Modal Aset Tetap – Pengadaan Aset Tetap.....	xxx
Perubahan SAL	xxx

c) Pembayaran Termin 100 %

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran yang diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal

Kontruksi Dalam Pekerjaan.....xxx
Utang Pengadaan Aset
Tetap.....xxx

Utang Pengadaan Aset Tetap.....xxx
RK PPKDxxx

Belanja Modal Aset Tetap – Pengadaan Aset Tetap.....xxx
Perubahan SALxxx

Aset Tetapxxx
Konstruksi Dalam Pekerjaan.....xxx

3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga/ donasi dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....xxx
Pendapatan hibah....LO.....xxx

4) Berdasarkan Berita Serah Terima Mutasi antar SKPD, PPK – SKPD akan mencatat dalam buku jurnal
SKPD Penerima Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap SKPD 1.....xxx
Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap antar SKPD.....xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap SKPD 1.....xxx
Koreksi Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap antar SKPD.....xxx

SKPD Pemberi Mutasi Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap antar SKPD.....xxx
Aset Tetap SKPD 2xxx
Koreksi Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap antar SKPD.....xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap SKPD 1.....xxx

5) Perolehan Melalui Pertukaran Aset Tetap

Apabila aset tetap yaang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai buku aset tetap yang dilepas dijurnal

Aset Tetap.....	xxx
Akumulasi Penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.....	xxx

Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai buku aset tetap yang dilepas dijurnal

Aset Tetap.....	xxx
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO.....	xxx
Akumulasi Penyusutan.....	xxx
Aset Tetap	xxx

b. Pengurangan

- 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Aset Lainnya.....	xxx
Akumulasi Penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Akumulasi penyusutan aset lainnya.....	xxx

- 2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklasifikasi ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Defisit penghapusan aset lainnya.....	xxx
Aset Lainnya.....	xxx

- 3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyusutan.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx

- 6) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Surplus penjualan aset tetap...LO.....	xxx

Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA.....	xxx

- 7) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Defisit penjualan aset tetap...LO	xxx
Aset Tetap.....	xxx

Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA.....	xxx

- 8) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk).....	xxx
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar)..	xxx
Aset Tetap ...(yang keluar).....	xxx
Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO.....	xxx

- 9) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Beban Hibah.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx

10) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang belum tercatat dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Konstruksi Dalam Pengerjaan.....xxx
Aset
Tetap.....xxx

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*).

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap tersebut.

Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Aset Tetap.....xxx
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap.....xxx

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

a. Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

d. Pengurus Barang/Bendahara Barang

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah yang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-SKPD.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

- Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan
- Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan
- Kontrak/Perjanjian – Sewa/ yang Dipersamakan

- Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/ dokumen yang Dipersamakan
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BOT/Dokumen yang Dipersamakan
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan
- Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan
- Surat Lisensi dan *Franchise*/Ijin dari pemegang Haki Hak Cipta, Paten/Dokumen yang Dipersamakan
- Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.
- Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti Pengeluaran).

3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

a. Pada saat pengakuan/pembelian

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Tagihan Angsuran	xxx	
Penjualan.....	xxx	
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan...		
Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan		Xxx
-LO		
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan.....		Xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Angsuran	xxx	
Penjualan.....	xxx	
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan.....		
Defisit Penjualan Aset Gedung & Bangunan –	xxx	
LO		
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan.....		Xxx

2) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
.....		xxx
Pendapatan TGR -		
LO.....		

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.....	xxx	
Aset Tetap-		xxx
.....		

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.....	xxx	
Aset Tetap/Aset Lain-Lain-		xxx
.....		

5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT)-.....	xxx	
Tanah-.....		xxx

6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan

Bangun Serah Guna (BTO)-.....	xxx
Tanah-.....	xxx

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST

Bangun Serah Guna (BTO)-.....	xxx
.....	xxx
Utang Jangka Panjang	
Lainnya.....	

7) Aset Tidak Berwujud

Diakui pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Aset Tidak Berwujud-.....	xxx
.....	xxx
R/K	
PPKD.....	

8) Aset Lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset Lain-lain.....	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset	xxx
Tetap.....	
Aset	xxx
Tetap.....	

b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran -	xxx
.....	
Tagihan Angsuran	xxx
Penjualan.....	

Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -	xxx
.....	
Tuntutan Ganti	xxx
Rugi.....	

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

d. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusutan -.....	xxx
Akumulasi/Aset	xxx
KSO/BTO.....	

e. Amortisasi

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tidak berwujud tersebut.

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Amortisasi -.....	xxx	
Akumulasi Amortisasi-		xxx
.....		

- f. Pada saat selesai dikerjasamakan
- Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

Tanah -.....	xxx	
Bangunan -.....	xxx	
Bangun Guna Serah		xxx
(BOT).....		xxx
Pendapatan Lainnya-		
LO.....		

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

Tanah -.....	xxx	
Bangunan -.....	xxx	
Bangun Serah Guna		xxx
(BTO).....		

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

1. Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

- 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya;
- 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaannya melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.

c. Bendahara Penerimaan SKPD

- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;

- 2) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
 - 3) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP/SKR - Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;
 - 4) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah tanpa penetapan;
 - 5) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah dan Surat Tanda Setoran (STS);
 - 6) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;
 - 7) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan menyampaikan ke BUD;
 - 8) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD.
 - 9) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke Rekening Kas di Kas Daerah.
- d. PPKD selaku BUD
- Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.
- e. Pihak Ketiga
- Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
- Surat Tanda Setoran (STS)
- Bukti transfer/setor
- Nota kredit bank
- Bukti memorial
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :

- a. Selama tahun berjalan, apabila atas suatu pendapatan dilakukan penetapan terlebih dulu (*official assement*), maka Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerbitan surat ketetapan tersebut. Dalam hal pendapatan diterima tanpa penetapan maka Pendapatan-LO diakui bersamaan penerimaan kas (Pendapatan-LRA);
- a) Pada saat diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan (SKPD/SKRD), maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Piutang	xxx	
.....		xxx
Pendapatan-		
LO.....		

- b) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atas piutang tersebut, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara	xxx	
Penerimaan.....		xxx
Piutang		
.....		

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA.....		xxx

- c) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan tanpa adanya penetapan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara	xxx	
Penerimaan.....		xxx
Pendapatan-LO		
.....		

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA.....		xxx

- d) Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan.....		xxx

e) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah atas piutang pendapatan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD	xxx	
.....		xxx
Piutang		
.....		

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA.....		xxx

f) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah atas pendapatan tanpa penetapan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD	xxx	
.....		xxx
Pendapatan-LO		
.....		

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA.....		xxx

- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
- b.1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
 - b.2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- b.1. PPK-SKPD melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum dicatat dan belum diterima pembayarannya dengan membuat bukti memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Piutang Pendapatan	xxx	
Pendapatan-		xxx
LO.....		

Pada saat Penerimaan Kas
Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan dan diterbitkannya Tanda Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal:

Kas Bendahara Penerimaan	xxx	
.....		xxx
Piutang		
Pendapatan.....		

Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal:

R/K PPKD.....	xxx	
Piutang		xxx
Pendapatan.....		

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan – LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL.....	xxx	
Pendapatan-		xxx
LRA.....		

PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen transaksi pencatatan Pendapatan-LO yang telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO di tahun berjalan.
Jurnal balik pada awal tahun untuk Pendapatan-LO yang telah diakui tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan pembayarannya memakai metode tanpa penetapan:

Pendapatan-LO.....	xxx	
Piutang		xxx

- b.2 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas
PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat bukti memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima namun belum menjadi hak dengan membuat buku memorial sebagai berikut:

Pendapatan-LO	xxx	
Pendapatan Diterima		xxx
Dimuka.....		

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka.....	xxx	
Pendapatan-LO		xxx
.....		

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.
- 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP;
- 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
- 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD.
- 6) Menerima bukti tagihan dari PPTK/dokumen pembayaran dan/atau dokumen sumber lainnya.
- 7) Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.

d. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.
- 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal.
- 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- 4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;
- 5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.
- 6) Menyiapkan SPM.

- 7) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- 8) Membuat dokumen surat pengesahan SPJ untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

e. PPTK

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan.
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA.
- 5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung (LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6) Menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
- 7) Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang dikendalikannya.

f. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D .

2. Dokumen yang terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:

- Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

- Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan
- Surat Bukti Pengeluaran/Belanja
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran
- Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)
- SP2D LS/GU/Nihil
- Dokumen Kontrak/Perjanjian
- Dokumen lainnya

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:

1) Melalui Uang Persediaan

Beban diakui atau dicatat ketika bendahara pengeluaran melakukan input bukti pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan dengan penerbitan SP2D GU.

2) Melalui Kas daerah (LS)

Beban diakui atau dicatat pada saat bendahara pengeluaran membuat SPP dan belanja diakui atau dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar Kegiatan	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jika tidak dilakukan penginputan Bukti Panjar, maka jurnalnya:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Panjar Kegiatan	xxx

Jika dilakukan penginputan Bukti Panjar, maka jurnalnya:

Beban	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Panjar Kegiatan	xxx

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

- (2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pada saat kas dikeluarkan dan diinput bukti pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx
R/K PPKD.....	xxx

Belanja	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- (3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD) Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Pada saat bendahara pengeluaran membuat SPP-LS, jurnal yang dibuat adalah:

Beban	xxx
Utang Beban	xxx

Pada saat SP2D diterbitkan oleh BUD, jurnal yang dibuat adalah:

Utang Beban	xxx
R/K PPKD	xxx

Belanja.....	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Beban yaitu :

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban	xxx
Utang Beban.....	xxx

Pada awal tahun berikutnya agar tidak terjadi duplikasi beban dan utang beban, maka harus dilakukan jurnal balik :

Beban	xxx
Utang Beban.....	xxx

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat pengeluaran kas yang telah dilakukan namun belum menjadi beban tahun berjalan, maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka	xxx
Beban	xxx

Dalam hal proses transaksi pengeluaran kadang terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- 1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
- 2. Kesalahan perhitungan matematis,
- 3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
- 4. Kesalahan interpretasi fakta,
- 5. Kecurangan, atau
- 6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak ... -LO	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Pajak ... -LRA	xxx
Perubahan SAL	xxx

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Pajak ... -LO	xxx
Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Pajak ... -LRA	xxx

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

- a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

- a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran ..xxx	
Pendapatan Lainnya-LO.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx
Pendapatan Lainnya-LRA.....	xxx

- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

Ekuitas.....	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
Ekuitas	xxx
Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	
.....	xxx

- e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Ekuitas	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
 Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ..xxx	
Kas di Kas Daerah	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang Pemerintah Pusat	xxx

- (4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
Tanah Kantor	xxx
Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Peralatan Kantor.....	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 5 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 JANUARI 2019

SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, dan koreksi pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- a. Akuntansi Piutang PPKD
- b. Akuntansi Investasi PPKD
- c. Akuntansi Kewajiban PPKD
- d. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA PPKD;
- e. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD
- f. Koreksi dan Penyesuaian PPKD
- g. Akuntansi Aset PPKD
- h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
- i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD;
- j. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah diakomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO kedalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD:

- 1) Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan
- 2) PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur
- 3) Perpres untuk DAU
- 4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- 5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD adalah:

- a) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada akhir tahun, PPK-PPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.

Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Piutang.....	XX	
.....	X	XX
Pendapatan-		X
LO.....		

Mencatat jurnal balik pendapatan-LO atas piutang yang sudah diakui tahun sebelumnya

Pendapatan-	XXX	
LO.....		XXX
Piutang		

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang telah diakui tahun sebelumnya.

Kas di Kasda.....	xxx	
Pendapatan -LO.....		xxx
Perubahan-	xxx	
SAL.....		xxx
Pendapatan-LRA.....		

- b) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya
- Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar	XXX	
Tagihan.....		XXX
Tagihan		
Pinjaman.....		

- c) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-PPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-PPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban Penyisihan	XXX	
Piutang.....		XXX
Penyisihan		
Piutang.....		

- d) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang
- Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-PPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.
- Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan

Penyisihan	XXX	
Piutang.....		XXX
Beban Penyisihan		
Piutang.....		
Piutang.....		XXX

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan	XXX	
Piutang.....		
Piutang.....		XXX

- e) Mencatat Penerimaan Kas atas Piutang yang telah dihapusbukukan
- Jika piutang yang telah dihapuskan dapat diterima kembali maka akan dijurnal sebagai berikut.

Kas di Kasda.....	xxx	
Pendapatan -LO		xxx
Perubahan-SAL.....	xxx	
Pendapatan-LRA.....		xxx

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- 1) Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.
- 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen.

2. Dokumen sumber

- a) SP2D LS
- b) Nota Kredit
- c) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi
- d) Berita Acara/Surat Penyertaan Investasi

- e) Berita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya
 - f) Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal
 - g) Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - h) Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud
 - i) Sertifikat SBI
 - j) Sertifikat Deposito
 - k) Sertifikat Saham/Obligasi
 - l) Sertifikat SUN
 - m) Bukti Memorial
3. Prosedur Akuntansi
- a. Perolehan Investasi

- 1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (managemen kas), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Investasi Jk Pendek.....	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaan.....	XXX
Perubahan SAL	XXX

Jika perolehan investasi melalui utang, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal.

Investasi Jk Pendek.....	XXX
Utang Pembiayaan	XXX

Saat penerbitan SP2D, pengeluaran kas merupakan penghapusan utang pembiayaan, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal.

Utang Pembiayaan.....	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

- 2) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

Pengeluaran Pembiayaan-PMPD.....	XXX
Perubahan SAL	XXX

b. Pelepasan Investasi

- 1) Berdasarkan nota kredit dari bank, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Pendapatan bunga....LO.....	XXX
Investasi Jk Pendek.....	XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Perubahan SAL.....	XXX
Pendapatan Bunga...LRA.....	XXX

- 2) Berdasarkan nota kredit dari bank, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

 Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.....	XXX
Utang Dalam Negeri Obligasi.....	XXX

Perubahan SAL.....	XXX
Penerimaan Pembiayaan.....	XXX

 Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.....	XXX
Utang Dalam Negeri Obligasi.....	XXX

Perubahan SAL.....	XXX
Penerimaan Pembiayaan.....	XXX

c. Hasil Investasi

- 1) Hasil investasi jangka pendek

 Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
------------------------	-----

Pendapatan bunga.....LO.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Pendapatan bunga.....LRA.....XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:

a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah..... XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda LO.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRAXXX

b) Metode Ekuitas

Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah..... XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO... XXX

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA..... XXX

c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Pendapatan bunga dana bergulir	
LO.....	XXX

Perubahan SAL.....	XXX
Pendapatan Bunga dana	
bergulir..LRA.....	XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang).

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:

a. BUD/Kuasa BUD

- 1) Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

- 2. Dokumen Sumber
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:
 - a. Surat Perjanjian Utang
 - b. Nota kredit dari Bank
 - c. SP2D LS
- d. Dokumen Perjanjian Utang
- e. Bukti Memorial
- f. Surat Pernyataan Utang
- g. Surat Pembayaran Utang

- 3. Sistem dan Prosedur
Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

- a. Penambahan kewajiban
Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Hutang/Kewajiban Jangka panjang.....	XXX

Perubahan SAL.....	XXX
Penerimaan Pembiayaan.....	XXX

- b. Pengurangan Kewajiban
Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Bagian lancar Hutang Jk. Panjang.....	XXX
Kas di Kas Daerah.....	XXX

Pengeluaran Pembiayaan.....	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

Kewajiban Jangka Panjang.....XXX
Utang Pembiayaan.....XXX

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jk. Panjang.....XXX
Surplus penyelesaian utang.....LOXXX
Kas di Kas Daerah.....XXX

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.....XXX
Perubahan SAL.....XXX

- c. Pada saat penyusunan laporan keuangan,
Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-PPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Hutang/Kewajiban jangka panjang.....XXX
Bagian lancar Hutang jk.Panjang.....XXX

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN LRA

Pendapatan yang dikelola PPKD kabupaten adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas:

1. mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2. Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
3. Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan PPKD.
- 2) membuat SPJ Penerimaan.

c. PPKD Selaku BUD

- 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya .
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

d. Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait

- a. DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).
- b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).
- c. Dana Bagi Hasil:
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun).
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).
- d. Dana Penyesuaian:
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:

- a. Dana Hibah:
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).
 - Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
 - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan Pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD,

salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.

- Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat

Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ini antara lain:

- a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)

Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.

Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Kas di Kas Daerah	XXX	
Pendapatan Transfer –LO/Lain Pendapatan yg Sah-LO		XXX
Perubahan SAL	XXX	
Pendapatan Transfer–LRA/Lain Pendapatan yg Sah-LRA		XXX

- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas
- 1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
 - 2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Piutang.....	XXX	
Pendapatan -LO		XXX

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Pendapatan-LO.....	XXX	
Piutang.....		XXX

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

- 1) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD.
- 2) Membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada PPKD antara lain:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah
- c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan
- d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- e. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan

- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa
- g. Surat Tagihan dari pihak ketiga
- h. SP2D
- i. Bukti Pengeluaran Kas
- j. Kuitansi/Bukti Pembayaran
- k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- l. Surat Perintah Membay
- m.
- n. a Langsung (SPM-LS)
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- p. Dokumen Perjanjian Utang
- q. Surat Tagihan dari Penerima Subsidi
- r. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- s. Surat Keputusan Kepala Daerah
- t. Bukti Memorial
- u. Nota Debit
- v. Bukti akuntansi Lainnya

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD adalah :

- a. Selama tahun berjalan, pengakuan Beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:
 - Melalui Kas daerah (LS)
Beban diakui pada saat dibuat SPP dan belanja diakui pada saat terbitnya SP2D-LS.
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Hibah/Bansos.....	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban	XXX
Kas di Kas Daerah.....	XXX

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	XXX
Perubahan SAL	XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban.....	XXX
Utang Beban	XXX

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

Utang Beban.....	XXX
Kas di Kasda	XXX

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang beban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:

Belanja	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuaian atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Utang Beban.....	XXX
Beban	XXX

SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut :

- a) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	XXX
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	.. XXX

Perubahan SAL	XXX
SiLPA/SiKPA	XXX

- (2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

SiLPA/SiKPA.....	XXX
Perubahan SAL	XXX

- (3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	XXX
Utang Pemerintah Pusat	XXX

Perubahan SAL	XXX
SiLPA/SiKPA	XXX

- (4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

SiLPA/SiKPA	XXX
Perubahan SAL	XXX

- b) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	XXX
Utang	XXX

Perubahan SAL	XXX
SiLPA/SiKPA	XXX

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

SiLPA/SiKPA	XXX
Perubahan SAL	XXX

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 JANUARI 20

BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1	ASET	
1 . 1	ASET LANCAR	
1 . 1 . 1	Kas	D
1 . 1 . 1 . 01	Kas di Kas Daerah	
1 . 1 . 1 . 01 . 01	Kas di Kas Daerah	
1 . 1 . 1 . 01 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 1 . 02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1 . 1 . 1 . 02 . 01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1 . 1 . 1 . 03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	
1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	
1 . 1 . 1 . 04	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	
1 . 1 . 1 . 04 . 01	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	
1 . 1 . 1 . 05	Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	
1 . 1 . 1 . 05 . 01	Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	
1 . 1 . 1 . 06	Kas di Bendahara BOS	
1 . 1 . 1 . 06 . 01	Kas di Bendahara BOS	
1 . 1 . 1 . 08	Kas Lainnya	
1 . 1 . 1 . 08 . 01	Kas Lainnya	
1 . 1 . 1 . 09	Setara Kas	
1 . 1 . 1 . 09 . 01	Setara Kas	
1 . 1 . 1 . 09 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	D
1 . 1 . 2 . 01	Investasi dalam Saham	
1 . 1 . 2 . 01 . 01	Investasi dalam Saham	
1 . 1 . 2 . 01 . 02	Investasi Dalam Obligasi	
1 . 1 . 2 . 02	Investasi dalam Deposito	
1 . 1 . 2 . 02 . 01	Deposito Jangka Pendek	
1 . 1 . 2 . 03	Investasi Dalam SUN	
1 . 1 . 2 . 03 . 01	Investasi Dalam SUN	
1 . 1 . 2 . 04	Investasi Dalam SBI	
1 . 1 . 2 . 04 . 01	Investasi Dalam SBI	
1 . 1 . 2 . 05	Investasi Dalam SPN	
1 . 1 . 2 . 05 . 01	Investasi Dalam SPN	
1 . 1 . 2 . 06	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1 . 1 . 2 . 06 . 01	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1 . 1 . 2 . 07	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1 . 1 . 2 . 07 . 01	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1 . 1 . 3	Piutang Pendapatan	D
1 . 1 . 3 . 01	Piutang Pajak Daerah	
1 . 1 . 3 . 01 . 01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	
1 . 1 . 3 . 01 . 02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1 . 1 . 3 . 01 . 03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1 . 1 . 3 . 01 . 04	Piutang Pajak Air Permukaan	
1 . 1 . 3 . 01 . 05	Piutang Pajak Rokok	
1 . 1 . 3 . 01 . 06	Piutang Pajak Hotel	
1 . 1 . 3 . 01 . 07	Piutang Pajak Restoran	
1 . 1 . 3 . 01 . 08	Piutang Pajak Hiburan	

1 . 1 . 3 . 01 . 09	Piutang Pajak Reklame
1 . 1 . 3 . 01 . 10	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1 . 1 . 3 . 01 . 11	Piutang Pajak Parkir
1 . 1 . 3 . 01 . 12	Piutang Pajak Air Tanah
1 . 1 . 3 . 01 . 13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1 . 1 . 3 . 01 . 14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1 . 1 . 3 . 01 . 15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1 . 1 . 3 . 01 . 16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1 . 1 . 3 . 01 . 17	Piutang Pajak Lingkungan
1 . 1 . 3 . 02	Piutang Retribusi
1 . 1 . 3 . 02 . 01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1 . 1 . 3 . 02 . 02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1 . 1 . 3 . 02 . 03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil
1 . 1 . 3 . 02 . 04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1 . 1 . 3 . 02 . 05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1 . 1 . 3 . 02 . 06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1 . 1 . 3 . 02 . 07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1 . 1 . 3 . 02 . 08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1 . 1 . 3 . 02 . 09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1 . 1 . 3 . 02 . 10	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1 . 1 . 3 . 02 . 11	Piutang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
1 . 1 . 3 . 02 . 12	Piutang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
1 . 1 . 3 . 02 . 13	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1 . 1 . 3 . 02 . 14	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1 . 1 . 3 . 02 . 15	Piutang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
1 . 1 . 3 . 02 . 16	Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan
1 . 1 . 3 . 02 . 17	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
1 . 1 . 3 . 02 . 18	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 . 1 . 3 . 02 . 19	Piutang Retribusi Pasar Gorsir/Pertokoan
1 . 1 . 3 . 02 . 20	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1 . 1 . 3 . 02 . 21	Piutang Retribusi Terminal
1 . 1 . 3 . 02 . 22	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1 . 1 . 3 . 02 . 23	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1 . 1 . 3 . 02 . 24	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1 . 1 . 3 . 02 . 25	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1 . 1 . 3 . 02 . 26	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
1 . 1 . 3 . 02 . 27	Piutang Retribusi Penyebrangan Air
1 . 1 . 3 . 02 . 28	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1 . 1 . 3 . 02 . 29	Piutang Retribusi Jasa Usaha Perjalanan Wisata
1 . 1 . 3 . 02 . 30	Piutang Retribusi Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga
1 . 1 . 3 . 02 . 31	Piutang Retribusi Salon Kecantikan
1 . 1 . 3 . 02 . 32	Piutang Retribusi Jasa Pengguna WC
1 . 1 . 3 . 02 . 33	Piutang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia
1 . 1 . 3 . 02 . 34	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1 . 1 . 3 . 03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . 1 . 3 . 03 . 01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1 . 1 . 3 . 03 . 02	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1 . 1 . 3 . 03 . 03	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
1 . 1 . 3 . 03 . 04	Dst.....
1 . 1 . 3 . 04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1 . 1 . 3 . 04 . 01	Piutang Jasa Giro
1 . 1 . 3 . 04 . 02	Piutang Bunga deposito / Bank
1 . 1 . 3 . 04 . 03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1 . 1 . 3 . 04 . 04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1 . 1 . 3 . 04 . 05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1 . 1 . 3 . 04 . 06	Piutang Denda Pajak
1 . 1 . 3 . 04 . 07	Piutang Denda Retribusi
1 . 1 . 3 . 04 . 08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1 . 1 . 3 . 04 . 09	Piutang dari Pengembalian
1 . 1 . 3 . 04 . 10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1 . 1 . 3 . 04 . 11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1 . 1 . 3 . 04 . 12	Piutang Zakat	
1 . 1 . 3 . 04 . 13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	
1 . 1 . 3 . 04 . 14	Piutang BLUD	
1 . 1 . 3 . 04 . 15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
1 . 1 . 3 . 04 . 16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	
1 . 1 . 3 . 04 . 17	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya	
1 . 1 . 3 . 04 . 18	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	
1 . 1 . 3 . 04 . 19	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1 . 1 . 3 . 04 . 20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	
1 . 1 . 3 . 04 . 21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN	
1 . 1 . 3 . 04 . 22	Piutang dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	
1 . 1 . 3 . 04 . 23	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	
1 . 1 . 3 . 04 . 24	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota	
1 . 1 . 3 . 04 . 25	Piutang Dana Penyesuaian	
1 . 1 . 3 . 04 . 26	Piutang Pendapatan Bunga Bank (JKN)	
1 . 1 . 3 . 04 . 27	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Lain	
1 . 1 . 3 . 04 . 28	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten	
1 . 1 . 3 . 04 . 29	Piutang Dana Bagi Hasil Lainnya	
1 . 1 . 3 . 04 . 30	Piutang Sewa Tanah dan Bangunan	
1 . 1 . 3 . 04 . 31	Piutang Dana BOS	
1 . 1 . 3 . 04 . 32	Piutang Hibah	
1 . 1 . 3 . 05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
1 . 1 . 3 . 05 . 01	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1 . 1 . 3 . 05 . 02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
1 . 1 . 3 . 05 . 03	Piutang Dana Alokasi Umum	
1 . 1 . 3 . 05 . 04	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1 . 1 . 3 . 05 . 05	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	
1 . 1 . 3 . 06 . 01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur	
1 . 1 . 3 . 06 . 02	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus	
1 . 1 . 3 . 06 . 03	Piutang Transfer Dana Keistimewaan	
1 . 1 . 3 . 06 . 04	Piutang Transfer Dana Penyesuaian	
1 . 1 . 3 . 06 . 05	Piutang Transfer Dana Desa	
1 . 1 . 3 . 06 . 06	Piutang Transfer Dana Insentif Daerah	
1 . 1 . 3 . 07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1 . 1 . 3 . 07 . 01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
1 . 1 . 3 . 07 . 02	Piutang Transfer Lainnya...	
1 . 1 . 3 . 07 . 03	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 08	Piutang Pendapatan Lainnya	
1 . 1 . 3 . 08 . 01	Piutang Pendapatan Lainnya....	
1 . 1 . 3 . 08 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4	Piutang Lainnya	D
1 . 1 . 4 . 01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1 . 1 . 4 . 01 . 01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1 . 1 . 4 . 02 . 01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara	
1 . 1 . 4 . 02 . 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1 . 1 . 4 . 02 . 03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah	
1 . 1 . 4 . 02 . 04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1 . 1 . 4 . 02 . 05	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 1 . 4 . 03 . 01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Perorangan Dinas	
1 . 1 . 4 . 03 . 02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1 . 1 . 4 . 03 . 03	Dst.....	

1 . 1 . 4 . 04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1 . 1 . 4 . 04 . 01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1 . 1 . 4 . 04 . 02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	
1 . 1 . 4 . 05	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1 . 1 . 4 . 05 . 01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1 . 1 . 4 . 05 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 06	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1 . 1 . 4 . 06 . 01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1 . 1 . 4 . 06 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 07	Piutang Lain-Lain	
1 . 1 . 4 . 07 . 01	Panjar Kegiatan	
1 . 1 . 4 . 07 . 02	Uang Muka Operasional	
1 . 1 . 4 . 07 . 03	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
1 . 1 . 4 . 07 . 04	Piutang Lainnya	
1 . 1 . 4 . 08	Piutang Ganti Rugi Kekayaan Daerah	
1 . 1 . 4 . 08 . 01	Piutang Ganti Rugi Kekayaan Daerah	
1 . 1 . 4 . 09	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1 . 1 . 4 . 09 . 01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1 . 1 . 5	Penyisihan Piutang	D
1 . 1 . 5 . 01	Penyisihan Piutang Pendapatan	
1 . 1 . 5 . 01 . 01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
1 . 1 . 5 . 01 . 02	Penyisihan Piutang Retribusi	
1 . 1 . 5 . 01 . 03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1 . 1 . 5 . 01 . 04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1 . 1 . 5 . 01 . 05	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
1 . 1 . 5 . 01 . 06	Dst.....	
1 . 1 . 5 . 02	Penyisihan Piutang Lainnya	
1 . 1 . 5 . 02 . 01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1 . 1 . 5 . 02 . 03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 1 . 5 . 02 . 04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
1 . 1 . 5 . 02 . 06	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	
1 . 1 . 5 . 02 . 08	Penyisihan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1 . 1 . 5 . 02 . 09	Penyisihan Tagihan Pihak Ketiga	
1 . 1 . 5 . 03	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
1 . 1 . 5 . 03 . 01	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
1 . 1 . 5 . 04	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian	
1 . 1 . 5 . 04 . 01	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian	
1 . 1 . 6	Beban Dibayar Dimuka	D
1 . 1 . 6 . 01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 01 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 01 . 03	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 02	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 03	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 03 . 01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 04 . 01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 05	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 05 . 01	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 05 . 02	Dst.....	

1 . 1 . 7	Persediaan	D
1 . 1 . 7 . 01	Persediaan Bahan Pakai Habis	
1 . 1 . 7 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1 . 1 . 7 . 01 . 02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
1 . 1 . 7 . 01 . 03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	
1 . 1 . 7 . 01 . 04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	
1 . 1 . 7 . 01 . 05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
1 . 1 . 7 . 01 . 06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
1 . 1 . 7 . 01 . 07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	
1 . 1 . 7 . 01 . 08	Persediaan Isi tabung gas	
1 . 1 . 7 . 01 . 09	Persediaan Bahan Pembungkus	
1 . 1 . 7 . 01 . 10	Persediaan Bahan Alat Dapur	
1 . 1 . 7 . 01 . 11	Persediaan Bahan Alat Dapur	
1 . 1 . 7 . 01 . 12	Persediaan Bahan Alat Laboratorium	
1 . 1 . 7 . 01 . 13	Persediaan Logistik Bencana	
1 . 1 . 7 . 02	Persediaan Bahan/Material	
1 . 1 . 7 . 02 . 01	Persediaan Bahan baku bangunan	
1 . 1 . 7 . 02 . 02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	
1 . 1 . 7 . 02 . 03	Persediaan Bahan/bibit tanaman	
1 . 1 . 7 . 02 . 04	Persediaan Bibit ternak	
1 . 1 . 7 . 02 . 05	Persediaan Bahan obat-obatan	
1 . 1 . 7 . 02 . 06	Persediaan Bahan kimia	
1 . 1 . 7 . 02 . 07	Persediaan Barang Cetakan	
1 . 1 . 7 . 02 . 08	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1 . 1 . 7 . 02 . 10	Persediaan Bahan Sandang	
1 . 1 . 7 . 02 . 11	Persediaan Induk Ikan	
1 . 1 . 7 . 02 . 12	Persediaan Bahan Pembenihan	
1 . 1 . 7 . 03	Persediaan Barang Lainnya	
1 . 1 . 7 . 03 . 01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	
1 . 1 . 7 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	D
1 . 1 . 8 . 01	R/K SKPD	
1 . 1 . 8 . 01 . 01	R/K SKPD	
1 . 2	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1 . 2 . 1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D
1 . 2 . 1 . 01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1 . 2 . 1 . 01 . 01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	
1 . 2 . 1 . 01 . 02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1 . 2 . 1 . 01 . 03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1 . 2 . 1 . 01 . 04	Investasi kepada Pemerintah Pusat	
1 . 2 . 1 . 01 . 05	Investasi kepada Pemerintah Daerah	
1 . 2 . 1 . 01 . 06	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 02	Investasi dalam Obligasi	
1 . 2 . 1 . 02 . 01	Investasi dalam Obligasi.....	
1 . 2 . 1 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 03	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1 . 2 . 1 . 03 . 01	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1 . 2 . 1 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 04	Dana Bergulir	
1 . 2 . 1 . 04 . 01	Dana Bergulir	
1 . 2 . 1 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 05	Deposito Jangka Panjang	
1 . 2 . 1 . 05 . 01	Deposito Jangka Panjang	
1 . 2 . 1 . 05 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 06	Investasi Non Permanen Lainnya	
1 . 2 . 1 . 06 . 01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1 . 2 . 1 . 06 . 02	Dst.....	

1 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang Permanen	D
1 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyertaan Modal Kepada BUMN	
1 . 2 . 2 . 01 . 02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	
1 . 2 . 2 . 01 . 03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1 . 2 . 2 . 01 . 04	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1 . 2 . 2 . 02	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	
1 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	
1 . 2 . 2 . 03	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1 . 2 . 2 . 03 . 01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1 . 2 . 2 . 04	Investasi Permanen Lainnya	
1 . 2 . 2 . 04 . 01	Investasi Permanen Lainnya	
1 . 2 . 2 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 3	ASET TETAP	
1 . 3 . 1	Tanah	D
1 . 3 . 1 . 01	Tanah Perkampungan	
1 . 3 . 1 . 01 . 01	Tanah Kampung	
1 . 3 . 1 . 01 . 02	Tanah Emplasmen	
1 . 3 . 1 . 01 . 03	Tanah Kuburan	
1 . 3 . 1 . 02	Tanah Pertanian	
1 . 3 . 1 . 02 . 01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1 . 3 . 1 . 02 . 02	Tanah Tegalan	
1 . 3 . 1 . 02 . 03	Tanah Ladang	
1 . 3 . 1 . 03	Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 1 . 03 . 01	Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 1 . 04	Kebun Campuran	
1 . 3 . 1 . 04 . 01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
1 . 3 . 1 . 04 . 02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
1 . 3 . 1 . 05	Hutan	
1 . 3 . 1 . 05 . 01	Hutan Lebat	
1 . 3 . 1 . 05 . 02	Hutan Belukar	
1 . 3 . 1 . 05 . 03	Hutan Tanaman Jenis	
1 . 3 . 1 . 05 . 04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
1 . 3 . 1 . 05 . 05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
1 . 3 . 1 . 06	Kolam Ikan	
1 . 3 . 1 . 06 . 01	Kolam Ikan Tambak	
1 . 3 . 1 . 06 . 02	Kolam Ikan Air Tawar	
1 . 3 . 1 . 07	Danau/Rawa	
1 . 3 . 1 . 07 . 01	Tanah Rawa	
1 . 3 . 1 . 07 . 02	Tanah Danau	
1 . 3 . 1 . 08	Tanah Tandus/Rusak	
1 . 3 . 1 . 08 . 01	Tanah Tandus	
1 . 3 . 1 . 08 . 02	Tanah Rusak	
1 . 3 . 1 . 09	Alang-alang dan Padang Rumput	
1 . 3 . 1 . 09 . 01	Tanah Alang-alang	
1 . 3 . 1 . 09 . 02	Tanah Padang Rumput	
1 . 3 . 1 . 10	Tanah Pengguna Lain	
1 . 3 . 1 . 10 . 01	Tanah Penggalan	
1 . 3 . 1 . 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1 . 3 . 1 . 11 . 01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 1 . 11 . 02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
1 . 3 . 1 . 11 . 03	Tanah Untuk Bangunan Industri	
1 . 3 . 1 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
1 . 3 . 1 . 11 . 05	Tanah Kosong	
1 . 3 . 1 . 11 . 06	Tanah Peternakan	
1 . 3 . 1 . 11 . 07	Tanah Bangunan Pengairan	
1 . 3 . 1 . 11 . 08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
1 . 3 . 1 . 11 . 09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	

1 . 3 . 1 . 12	Tanah Pertambangan	
1 . 3 . 1 . 12 . 01	Tanah Pertambangan	
1 . 3 . 1 . 13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1 . 3 . 1 . 13 . 01	Tanah Lapangan Olah Raga	
1 . 3 . 1 . 13 . 02	Tanah Lapangan Parkir	
1 . 3 . 1 . 13 . 03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	
1 . 3 . 1 . 13 . 04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1 . 3 . 1 . 13 . 05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1 . 3 . 1 . 13 . 06	Tanah Lapangan Terbang	
1 . 3 . 1 . 13 . 07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	
1 . 3 . 1 . 13 . 08	Tanah Untuk Bangunan Air	
1 . 3 . 1 . 13 . 09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
1 . 3 . 1 . 13 . 10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
1 . 3 . 1 . 13 . 11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 1 . 13 . 12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
1 . 3 . 1 . 13 . 13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1 . 3 . 1 . 14	Tanah BLUD	
1 . 3 . 1 . 14 . 01	tanah BLUD	
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	D
1 . 3 . 2 . 01	Alat-Alat Besar Darat	
1 . 3 . 2 . 01 . 01	Alat-Alat Besar Darat Tractor	
1 . 3 . 2 . 01 . 02	Alat-Alat Besar Darat Grader	
1 . 3 . 2 . 01 . 03	Alat-Alat Besar Darat Excavator	
1 . 3 . 2 . 01 . 04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	
1 . 3 . 2 . 01 . 05	Alat-Alat Besar Darat Hauler	
1 . 3 . 2 . 01 . 06	Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment	
1 . 3 . 2 . 01 . 07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	
1 . 3 . 2 . 01 . 08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	
1 . 3 . 2 . 01 . 09	Alat-Alat Besar Darat Loader	
1 . 3 . 2 . 01 . 10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	
1 . 3 . 2 . 01 . 11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	
1 . 3 . 2 . 02	Alat-Alat Besar Apung	
1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat-Alat Besar Apung Dredger	
1 . 3 . 2 . 02 . 02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	
1 . 3 . 2 . 02 . 03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	
1 . 3 . 2 . 02 . 04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	
1 . 3 . 2 . 02 . 05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	
1 . 3 . 2 . 03	Alat-alat Bantu	
1 . 3 . 2 . 03 . 01	Alat-alat Bantu Alat Penarik	
1 . 3 . 2 . 03 . 02	Alat-alat Bantu Feeder	
1 . 3 . 2 . 03 . 03	Alat-alat Bantu Compressor	
1 . 3 . 2 . 03 . 04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	
1 . 3 . 2 . 03 . 05	Alat-alat Bantu Pompa	
1 . 3 . 2 . 03 . 06	Alat-alat Bantu Mesin Bor	
1 . 3 . 2 . 03 . 07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	
1 . 3 . 2 . 03 . 08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	
1 . 3 . 2 . 03 . 09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
1 . 3 . 2 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1 . 3 . 2 . 04 . 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1 . 3 . 2 . 04 . 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	
1 . 3 . 2 . 04 . 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1 . 3 . 2 . 04 . 04	Kendaraan Bermotor Khusus	
1 . 3 . 2 . 04 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1 . 3 . 2 . 04 . 06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1 . 3 . 2 . 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1 . 3 . 2 . 05 . 01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1 . 3 . 2 . 05 . 02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
1 . 3 . 2 . 06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
1 . 3 . 2 . 06 . 03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	

1 . 3 . 2 . 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1 . 3 . 2 . 07 . 01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1 . 3 . 2 . 07 . 02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1 . 3 . 2 . 07 . 03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1 . 3 . 2 . 08	Alat Angkut Bermotor Udara
1 . 3 . 2 . 08 . 01	Kapal Terbang
1 . 3 . 2 . 09	Alat Bengkel Bermesin
1 . 3 . 2 . 09 . 01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1 . 3 . 2 . 09 . 02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1 . 3 . 2 . 09 . 03	Perkakas Bengkel Listrik
1 . 3 . 2 . 09 . 04	Perkakas Bengkel Service
1 . 3 . 2 . 09 . 05	Perkakas Pengangkat Bermesin
1 . 3 . 2 . 09 . 06	Perkakas Bengkel Kayu
1 . 3 . 2 . 09 . 07	Perkakas Bengkel Khusus
1 . 3 . 2 . 09 . 08	Peralatan Las
1 . 3 . 2 . 09 . 09	Perkakas Pabrik Es
1 . 3 . 2 . 10	Alat Bengkel Tak Bermesin
1 . 3 . 2 . 10 . 01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1 . 3 . 2 . 10 . 02	Perkakas Bengkel Listrik
1 . 3 . 2 . 10 . 03	Perkakas Bengkel Service
1 . 3 . 2 . 10 . 04	Perkakas Pengangkat
1 . 3 . 2 . 10 . 05	Perkakas Standar (Standart Tool)
1 . 3 . 2 . 10 . 06	Perkakas Khusus (Special Tool)
1 . 3 . 2 . 10 . 07	Perkakas Bengkel Kerja
1 . 3 . 2 . 10 . 08	Peralatan Tukang-tukang Besi
1 . 3 . 2 . 10 . 09	Peralatan Tukang Kayu
1 . 3 . 2 . 10 . 10	Peralatan Tukang Kulit
1 . 3 . 2 . 10 . 11	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1 . 3 . 2 . 11	Alat Ukur
1 . 3 . 2 . 11 . 01	Alat Ukur universal
1 . 3 . 2 . 11 . 02	Alat Ukur/Test Intelegensia
1 . 3 . 2 . 11 . 03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1 . 3 . 2 . 11 . 04	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1 . 3 . 2 . 11 . 05	Alat Calibrasi
1 . 3 . 2 . 11 . 06	Alat Ukur Oscilloscope
1 . 3 . 2 . 11 . 07	Alat Ukur Universal Tester
1 . 3 . 2 . 11 . 08	Alat Ukur/Pembanding
1 . 3 . 2 . 11 . 09	Alat Ukur Lainnya
1 . 3 . 2 . 11 . 10	Alat Timbangan/Blora
1 . 3 . 2 . 11 . 11	Anak Timbangan/Biasa
1 . 3 . 2 . 11 . 12	Takaran Kering
1 . 3 . 2 . 11 . 13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1 . 3 . 2 . 11 . 14	Takaran Latex/Getah Susu
1 . 3 . 2 . 11 . 15	Gelas Takar Berbagai Capasitas
1 . 3 . 2 . 12	Alat Pengolahan
1 . 3 . 2 . 12 . 01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1 . 3 . 2 . 12 . 02	Alat Panen/Pengolahan
1 . 3 . 2 . 12 . 03	Alat-Alat Peternakan
1 . 3 . 2 . 12 . 04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1 . 3 . 2 . 12 . 05	Alat Laboratorium Pertanian
1 . 3 . 2 . 12 . 06	Alat Prosesing
1 . 3 . 2 . 12 . 07	Alat Pasca Panen
1 . 3 . 2 . 12 . 08	Alat Produksi Perikanan
1 . 3 . 2 . 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1 . 3 . 2 . 13 . 01	Alat Pemeliharaan Tanaman
1 . 3 . 2 . 13 . 02	Alat Panen
1 . 3 . 2 . 13 . 03	Alat Penyimpanan
1 . 3 . 2 . 13 . 04	Alat Laboratorium
1 . 3 . 2 . 13 . 05	Alat Penangkap Ikan

1 . 3 . 2 . 14	Alat Kantor
1 . 3 . 2 . 14 . 01	Mesin Tik
1 . 3 . 2 . 14 . 02	Mesin Hitung/Jumlah
1 . 3 . 2 . 14 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)
1 . 3 . 2 . 14 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1 . 3 . 2 . 14 . 05	Alat Kantor Lainnya
1 . 3 . 2 . 15	Alat Rumah Tangga
1 . 3 . 2 . 15 . 01	Meubelair
1 . 3 . 2 . 15 . 02	Alat Pengukur Waktu
1 . 3 . 2 . 15 . 03	Alat Pembersih
1 . 3 . 2 . 15 . 04	Alat Pendingin
1 . 3 . 2 . 15 . 05	Alat Dapur
1 . 3 . 2 . 15 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1 . 3 . 2 . 15 . 07	Alat Pemadam Kebakaran
1 . 3 . 2 . 16	Komputer
1 . 3 . 2 . 16 . 01	Komputer Unit/Jaringan
1 . 3 . 2 . 16 . 02	Personal Komputer
1 . 3 . 2 . 16 . 03	Peralatan Komputer Mainframe
1 . 3 . 2 . 16 . 04	Peralatan Mini Komputer
1 . 3 . 2 . 16 . 05	Peralatan Personal Komputer
1 . 3 . 2 . 16 . 06	Peralatan Jaringan
1 . 3 . 2 . 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 01	Meja Kerja Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 02	Meja Rapat Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 03	Kursi Kerja Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 04	Kursi Rapat Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1 . 3 . 2 . 17 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat
1 . 3 . 2 . 18	Alat Studio
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Peralatan Studio Visual
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Peralatan Studio Video dan Film
1 . 3 . 2 . 18 . 03	Peralatan Studio Video dan Film A
1 . 3 . 2 . 18 . 04	Peralatan Cetak
1 . 3 . 2 . 18 . 05	Peralatan Computing
1 . 3 . 2 . 18 . 06	Peralatan Pemetaan Ukur
1 . 3 . 2 . 19	Alat Komunikasi
1 . 3 . 2 . 19 . 01	Alat Komunikasi Telephone
1 . 3 . 2 . 19 . 02	Alat Komunikasi Radio SSB
1 . 3 . 2 . 19 . 03	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1 . 3 . 2 . 19 . 04	Alat Komunikasi Radio VHF
1 . 3 . 2 . 19 . 05	Alat Komunikasi Radio UHF
1 . 3 . 2 . 19 . 06	Alat Komunikasi Sosial
1 . 3 . 2 . 19 . 07	Alat-alat Sandi
1 . 3 . 2 . 20	Peralatan Pemancar
1 . 3 . 2 . 20 . 01	Peralatan Pemancar MF/MW
1 . 3 . 2 . 20 . 02	Peralatan Pemancar HF/SW
1 . 3 . 2 . 20 . 03	Peralatan Pemancar VHF/FM
1 . 3 . 2 . 20 . 04	Peralatan Pemancar UHF
1 . 3 . 2 . 20 . 05	Peralatan Pemancar SHF
1 . 3 . 2 . 20 . 06	Peralatan Antena MF/MW
1 . 3 . 2 . 20 . 07	Peralatan Antena HF/SW
1 . 3 . 2 . 20 . 08	Peralatan Antena VHF/FM
1 . 3 . 2 . 20 . 09	Peralatan Antena UHF
1 . 3 . 2 . 20 . 10	Peralatan Antena SHF/Parabola
1 . 3 . 2 . 20 . 11	Peralatan Translator VHF/VHF
1 . 3 . 2 . 20 . 12	Peralatan Translator UHF/UHF
1 . 3 . 2 . 20 . 13	Peralatan Translator VHF/UHF
1 . 3 . 2 . 20 . 14	Peralatan Translator UHF/VHF
1 . 3 . 2 . 20 . 15	Peralatan Microvawe FPU
1 . 3 . 2 . 20 . 16	Peralatan Microvawe Terestrial

1 . 3 . 2 . 20 . 17	Peralatan Microvawe TVRO
1 . 3 . 2 . 20 . 18	Peralatan Dummy Load
1 . 3 . 2 . 20 . 19	Switcher Antena
1 . 3 . 2 . 20 . 20	Switcher/Menara Antena
1 . 3 . 2 . 20 . 21	Feeder
1 . 3 . 2 . 20 . 22	Humidity Control
1 . 3 . 2 . 20 . 23	Program Input Equipment
1 . 3 . 2 . 20 . 24	Peralatan Antena Penerima VHF
1 . 3 . 2 . 21	Alat Kedokteran
1 . 3 . 2 . 21 . 01	Alat Kedokteran Umum
1 . 3 . 2 . 21 . 02	Alat Kedokteran Gigi
1 . 3 . 2 . 21 . 03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1 . 3 . 2 . 21 . 04	Alat Kedokteran Mata
1 . 3 . 2 . 21 . 05	Alat Kedokteran T.H.T
1 . 3 . 2 . 21 . 06	Alat Rotgen
1 . 3 . 2 . 21 . 07	Alat Farmasi
1 . 3 . 2 . 21 . 08	Alat Kedokteran Bedah
1 . 3 . 2 . 21 . 09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1 . 3 . 2 . 21 . 10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
1 . 3 . 2 . 21 . 11	Alat Kedokteran Mortuary
1 . 3 . 2 . 21 . 12	Alat Kesehatan Anak
1 . 3 . 2 . 21 . 13	Alat Kedokteran Poliklinik Set
1 . 3 . 2 . 21 . 14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
1 . 3 . 2 . 21 . 15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1 . 3 . 2 . 21 . 16	Alat Kedokteran Jantung
1 . 3 . 2 . 21 . 17	Alat Kedokteran Nuklir
1 . 3 . 2 . 21 . 18	Alat Kedokteran Radiologi
1 . 3 . 2 . 21 . 19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1 . 3 . 2 . 21 . 20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1 . 3 . 2 . 21 . 21	Alat Kedokteran Jiwa
1 . 3 . 2 . 21 . 22	Alat Kedokteran Hewan
1 . 3 . 2 . 22	Alat Kesehatan
1 . 3 . 2 . 22 . 01	Alat Kesehatan Perawatan
1 . 3 . 2 . 22 . 02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1 . 3 . 2 . 22 . 03	Alat Kesehatan Matra Laut
1 . 3 . 2 . 22 . 04	Alat Kesehatan Matra Udara
1 . 3 . 2 . 22 . 05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1 . 3 . 2 . 22 . 06	Alat Kesehatan Olahraga
1 . 3 . 2 . 23	Unit-Unit Laboratorium
1 . 3 . 2 . 23 . 01	Alat Laboratorium Kimia Air
1 . 3 . 2 . 23 . 02	Alat Laboratorium Microbiologi
1 . 3 . 2 . 23 . 03	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1 . 3 . 2 . 23 . 04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1 . 3 . 2 . 23 . 05	Alat laboratorium Buatan/Geologi
1 . 3 . 2 . 23 . 06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1 . 3 . 2 . 23 . 07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1 . 3 . 2 . 23 . 08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
1 . 3 . 2 . 23 . 09	Alat Laboratorium Cocom Tanam
1 . 3 . 2 . 23 . 10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1 . 3 . 2 . 23 . 11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1 . 3 . 2 . 23 . 12	Alat Laboratorium Umum
1 . 3 . 2 . 23 . 13	Alat Laboratorium Umum A
1 . 3 . 2 . 23 . 14	Alat Laboratorium Kedokteran
1 . 3 . 2 . 23 . 15	Alat Laboratorium Microbiologi
1 . 3 . 2 . 23 . 16	Alat Laboratorium Kimia
1 . 3 . 2 . 23 . 17	Alat Laboratorium Microbiologi A
1 . 3 . 2 . 23 . 18	Alat Laboratorium Patologi
1 . 3 . 2 . 23 . 19	Alat Laboratorium Immunologi
1 . 3 . 2 . 23 . 20	Alat Laboratorium Hematologi
1 . 3 . 2 . 23 . 21	Alat Laboratorium Film
1 . 3 . 2 . 23 . 22	Alat Laboratorium Makanan
1 . 3 . 2 . 23 . 23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1 . 3 . 2 . 23 . 24	Alat Laboratorium Farmasi

1 . 3 . 2 . 23 . 25	Alat Laboratorium Fisika
1 . 3 . 2 . 23 . 26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1 . 3 . 2 . 23 . 27	Alat Laboratorium Klimatologi
1 . 3 . 2 . 23 . 28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1 . 3 . 2 . 23 . 29	Alat Laboratorium Pasir
1 . 3 . 2 . 23 . 30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1 . 3 . 2 . 23 . 31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1 . 3 . 2 . 23 . 32	Alat Laboratorium Metalography
1 . 3 . 2 . 23 . 33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1 . 3 . 2 . 23 . 34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1 . 3 . 2 . 23 . 35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1 . 3 . 2 . 23 . 36	Alat Laboratorium Matrologie
1 . 3 . 2 . 23 . 37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1 . 3 . 2 . 23 . 38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1 . 3 . 2 . 23 . 39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1 . 3 . 2 . 23 . 40	Alat Laboratorium Uji Tekstel
1 . 3 . 2 . 23 . 41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1 . 3 . 2 . 23 . 42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1 . 3 . 2 . 23 . 43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1 . 3 . 2 . 23 . 44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1 . 3 . 2 . 23 . 45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1 . 3 . 2 . 23 . 46	Alat Laboratorium Pertanian
1 . 3 . 2 . 23 . 47	Alat Laboratorium Pertanian A
1 . 3 . 2 . 23 . 48	Alat Laboratorium Pertanian B
1 . 3 . 2 . 23 . 49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1 . 3 . 2 . 23 . 50	Alat Laboratorium Energi Surya
1 . 3 . 2 . 23 . 51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1 . 3 . 2 . 23 . 52	Alat Laboratorium Oceanografi
1 . 3 . 2 . 23 . 53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1 . 3 . 2 . 23 . 54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1 . 3 . 2 . 23 . 55	Alat Laboratorium Biologi
1 . 3 . 2 . 23 . 56	Alat Laboratorium Geofisika
1 . 3 . 2 . 23 . 57	Alat Laboratorium Tambang
1 . 3 . 2 . 23 . 58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1 . 3 . 2 . 23 . 59	Alat Laboratorium Proses Industri
1 . 3 . 2 . 23 . 60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1 . 3 . 2 . 23 . 61	Laboratorium Kearsipan
1 . 3 . 2 . 23 . 62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1 . 3 . 2 . 23 . 63	Alat Laboratorium Lainnya
1 . 3 . 2 . 23 . 64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1 . 3 . 2 . 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah
1 . 3 . 2 . 24 . 01	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1 . 3 . 2 . 24 . 02	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika
1 . 3 . 2 . 24 . 03	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar
1 . 3 . 2 . 24 . 04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan
1 . 3 . 2 . 24 . 05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah
1 . 3 . 2 . 24 . 06	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas
1 . 3 . 2 . 24 . 07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS
1 . 3 . 2 . 24 . 08	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam
1 . 3 . 2 . 24 . 09	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan
1 . 3 . 2 . 24 . 10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian
1 . 3 . 2 . 24 . 11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga
1 . 3 . 2 . 24 . 12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP
1 . 3 . 2 . 24 . 13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1 . 3 . 2 . 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1 . 3 . 2 . 25 . 01	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument
1 . 3 . 2 . 25 . 02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor
1 . 3 . 2 . 25 . 03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool
1 . 3 . 2 . 25 . 04	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A
1 . 3 . 2 . 25 . 05	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils
1 . 3 . 2 . 25 . 06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment

1 . 3 . 2 . 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1 . 3 . 2 . 26 . 01	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector
1 . 3 . 2 . 26 . 02	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scentific
1 . 3 . 2 . 26 . 03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System
1 . 3 . 2 . 26 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display
1 . 3 . 2 . 26 . 05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply
1 . 3 . 2 . 26 . 06	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device
1 . 3 . 2 . 26 . 07	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics
1 . 3 . 2 . 26 . 08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator
1 . 3 . 2 . 26 . 09	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System
1 . 3 . 2 . 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1 . 3 . 2 . 27 . 01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan
1 . 3 . 2 . 27 . 02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja
1 . 3 . 2 . 27 . 03	Proteksi Lingkungan
1 . 3 . 2 . 27 . 04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment
1 . 3 . 2 . 27 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi
1 . 3 . 2 . 28	Radiation Aplcation and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1 . 3 . 2 . 28 . 01	Radiation Application Equipment
1 . 3 . 2 . 28 . 02	Non Destructive Test (NDT) Device
1 . 3 . 2 . 28 . 03	Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
1 . 3 . 2 . 28 . 04	Peralatan Hidrologi
1 . 3 . 2 . 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1 . 3 . 2 . 29 . 01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1 . 3 . 2 . 29 . 02	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1 . 3 . 2 . 29 . 03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1 . 3 . 2 . 29 . 04	Laboratorium Lingkungan
1 . 3 . 2 . 29 . 05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang
1 . 3 . 2 . 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1 . 3 . 2 . 30 . 01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
1 . 3 . 2 . 30 . 02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
1 . 3 . 2 . 30 . 03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquistion and Analyzing System
1 . 3 . 2 . 30 . 04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel
1 . 3 . 2 . 30 . 05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes
1 . 3 . 2 . 30 . 06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum
1 . 3 . 2 . 30 . 07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop
1 . 3 . 2 . 30 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop
1 . 3 . 2 . 30 . 09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop
1 . 3 . 2 . 30 . 10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1 . 3 . 2 . 30 . 11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop
1 . 3 . 2 . 30 . 12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1 . 3 . 2 . 30 . 13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop
1 . 3 . 2 . 30 . 14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB
1 . 3 . 2 . 30 . 15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment
1 . 3 . 2 . 31	Senjata Api
1 . 3 . 2 . 31 . 01	Senjata Genggam
1 . 3 . 2 . 31 . 02	Senjata Pinggang
1 . 3 . 2 . 31 . 03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1 . 3 . 2 . 31 . 04	Senapan Mesin

1 . 3 . 2 . 31 . 05	Senjata Api Mortir	
1 . 3 . 2 . 31 . 06	Senjata Api Anti Lapis Baja	
1 . 3 . 2 . 31 . 07	Senjata Api Artileri Medan (Armed)	
1 . 3 . 2 . 31 . 08	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
1 . 3 . 2 . 31 . 09	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal	
1 . 3 . 2 . 31 . 10	Senjata Api Kavaleri	
1 . 3 . 2 . 31 . 11	Senjata Lain-lain	
1 . 3 . 2 . 32	Persenjataan Non Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 32 . 01	Alat Keamanan	
1 . 3 . 2 . 32 . 02	Non Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 33	Amunisi	
1 . 3 . 2 . 33 . 01	Amunisi Umum	
1 . 3 . 2 . 33 . 02	Amunisi Darat	
1 . 3 . 2 . 34	Senjata Sinar	
1 . 3 . 2 . 34 . 01	Senjata Sinar Laser	
1 . 3 . 2 . 35	Alat Keamanan dan Perlindungan	
1 . 3 . 2 . 35 . 01	Alat Bantu Kemanan	
1 . 3 . 2 . 35 . 02	Alat Perlindungan	
1 . 3 . 2 . 36	Peralatan dan Mesin BLUD	
1 . 3 . 2 . 36 . 01	Peralatan dan Mesin-BLUD	
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	D
1 . 3 . 3 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor	
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gudang	
1 . 3 . 3 . 01 . 03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
1 . 3 . 3 . 01 . 04	Bangunan Gedung Instalasi	
1 . 3 . 3 . 01 . 05	Bangunan Gedung Laboratorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 06	Bangunan Kesehatan	
1 . 3 . 3 . 01 . 07	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1 . 3 . 3 . 01 . 09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1 . 3 . 3 . 01 . 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1 . 3 . 3 . 01 . 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
1 . 3 . 3 . 01 . 12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1 . 3 . 3 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
1 . 3 . 3 . 01 . 14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1 . 3 . 3 . 01 . 15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1 . 3 . 3 . 01 . 16	Bangunan Gedung Pabrik	
1 . 3 . 3 . 01 . 17	Bangunan Stasiun Bus	
1 . 3 . 3 . 01 . 18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
1 . 3 . 3 . 01 . 19	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1 . 3 . 3 . 01 . 20	Bangunan Gedung Museum	
1 . 3 . 3 . 01 . 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
1 . 3 . 3 . 01 . 22	Bangunan Pengujian Kelaikan	
1 . 3 . 3 . 01 . 23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan	
1 . 3 . 3 . 01 . 24	Bangunan Rumah Tahanan	
1 . 3 . 3 . 01 . 25	Bangunan Gedung Kramatorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1 . 3 . 3 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1 . 3 . 3 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 3 . 02 . 01	Rumah Negara Golongan I	
1 . 3 . 3 . 02 . 02	Rumah Negara Golongan II	
1 . 3 . 3 . 02 . 03	Rumah Negara Golongan III	
1 . 3 . 3 . 02 . 04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1 . 3 . 3 . 02 . 05	Asrama	
1 . 3 . 3 . 02 . 06	Hotel	
1 . 3 . 3 . 02 . 07	Motel	
1 . 3 . 3 . 02 . 08	Flat/Rumah Susun	
1 . 3 . 3 . 03	Bangunan Menara	
1 . 3 . 3 . 03 . 01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
1 . 3 . 3 . 03 . 02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai	
1 . 3 . 3 . 03 . 03	Bangunan Menara Telekomunikasi	

1 . 3 . 3 . 04	Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 3 . 04 . 01	Istana Peringatan	
1 . 3 . 3 . 04 . 02	Rumah Adat	
1 . 3 . 3 . 04 . 03	Rumah Peninggalan Sejarah	
1 . 3 . 3 . 04 . 04	Makam Sejarah	
1 . 3 . 3 . 04 . 05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
1 . 3 . 3 . 05	Tugu Peringatan	
1 . 3 . 3 . 05 . 01	Tugu Kemerdekaan	
1 . 3 . 3 . 05 . 02	Tugu Pembangunan	
1 . 3 . 3 . 05 . 03	Tugu Peringatan Lainnya	
1 . 3 . 3 . 06	Candi	
1 . 3 . 3 . 06 . 01	Candi Hindhu	
1 . 3 . 3 . 06 . 02	Candi Budha	
1 . 3 . 3 . 06 . 03	Candi Lainnya	
1 . 3 . 3 . 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 3 . 07 . 01	Bangunan Bersejarah Lainnya	
1 . 3 . 3 . 08	Tugu Peringatan	
1 . 3 . 3 . 08 . 01	Tugu Peringatan	
1 . 3 . 3 . 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 . 3 . 3 . 09 . 01	Tugu/Tanda Batas	
1 . 3 . 3 . 10	Rambu-Rambu	
1 . 3 . 3 . 10 . 01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
1 . 3 . 3 . 10 . 02	Rambu Tidak Bersuar	
1 . 3 . 3 . 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1 . 3 . 3 . 11 . 01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	
1 . 3 . 3 . 11 . 02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1 . 3 . 3 . 11 . 03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	
1 . 3 . 3 . 11 . 04	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)	
1 . 3 . 3 . 11 . 05	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	
1 . 3 . 3 . 11 . 06	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	
1 . 3 . 3 . 12	Gedung dan Bangunan-BLUD	
1 . 3 . 3 . 12 . 01	Gedung dan Bangunan-BLUD	
1 . 3 . 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D
1 . 3 . 4 . 01	Jalan	
1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan Negara/Nasional	
1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jalan Propinsi	
1 . 3 . 4 . 01 . 03	Jalan Kabupaten/Kota	
1 . 3 . 4 . 01 . 04	Jalan Desa	
1 . 3 . 4 . 01 . 05	Jalan Khusus	
1 . 3 . 4 . 01 . 06	Jalan Tol	
1 . 3 . 4 . 01 . 07	Jalan Kereta	
1 . 3 . 4 . 01 . 08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1 . 3 . 4 . 02	Jembatan	
1 . 3 . 4 . 02 . 01	Jembatan Negara/Nasional	
1 . 3 . 4 . 02 . 02	Jembatan Propinsi	
1 . 3 . 4 . 02 . 03	Jembatan Kabupaten/Kota	
1 . 3 . 4 . 02 . 04	Jembatan Desa	
1 . 3 . 4 . 02 . 05	Jembatan Khusus	
1 . 3 . 4 . 02 . 06	Jembatan Pada Jalan Tol	
1 . 3 . 4 . 02 . 07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
1 . 3 . 4 . 02 . 08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1 . 3 . 4 . 02 . 09	Jembatan Penyeberangan	
1 . 3 . 4 . 03	Bangunan Air Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 01	Bangunan Waduk Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 02	Bangunan Pengambilan Irigasi	

1 . 3 . 4 . 03 . 03	Bangunan Pembawa Irigasi
1 . 3 . 4 . 03 . 04	Bangunan Pembuang Irigasi
1 . 3 . 4 . 03 . 05	Bangunan Pengaman Irigasi
1 . 3 . 4 . 03 . 06	Bangunan Pelengkap Irigasi
1 . 3 . 4 . 04	Bangunan Air Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Bangunan Waduk Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 03	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 04 . 07	Bangunan Sawah Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 05	Bangunan Air Rawa
1 . 3 . 4 . 05 . 01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1 . 3 . 4 . 05 . 02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1 . 3 . 4 . 05 . 03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1 . 3 . 4 . 05 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1 . 3 . 4 . 05 . 05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1 . 3 . 4 . 05 . 06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1 . 3 . 4 . 05 . 07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1 . 3 . 4 . 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1 . 3 . 4 . 06 . 01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1 . 3 . 4 . 06 . 02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1 . 3 . 4 . 06 . 03	Bangunan Pembuang Pengaman
1 . 3 . 4 . 06 . 04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1 . 3 . 4 . 06 . 05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1 . 3 . 4 . 06 . 06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1 . 3 . 4 . 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1 . 3 . 4 . 07 . 01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 4 . 07 . 02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 4 . 07 . 03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 4 . 07 . 04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 4 . 07 . 05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 4 . 07 . 06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 4 . 08	Bangunan Air Bersih/Baku
1 . 3 . 4 . 08 . 01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1 . 3 . 4 . 08 . 02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1 . 3 . 4 . 08 . 03	Bangunan Pembawa Air Bersih
1 . 3 . 4 . 08 . 04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1 . 3 . 4 . 08 . 05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1 . 3 . 4 . 09	Bangunan Air Kotor
1 . 3 . 4 . 09 . 01	Bangunan Pembawa Air Kotor
1 . 3 . 4 . 09 . 02	Bangunan Waduk Air Kotor
1 . 3 . 4 . 09 . 03	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1 . 3 . 4 . 09 . 04	Bangunan Pengaman Air Kotor
1 . 3 . 4 . 09 . 05	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1 . 3 . 4 . 10	Bangunan Air
1 . 3 . 4 . 10 . 01	Bangunan Air Laut
1 . 3 . 4 . 10 . 02	Bangunan Air Tawar
1 . 3 . 4 . 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih
1 . 3 . 4 . 11 . 01	Instalasi Air Muka Tanah
1 . 3 . 4 . 11 . 02	Instalasi Air Sumber /Mata Air
1 . 3 . 4 . 11 . 03	Instalasi Air Tanah Dalam
1 . 3 . 4 . 11 . 04	Instalasi Air Tanah Dangkal
1 . 3 . 4 . 11 . 05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1 . 3 . 4 . 12	Instalasi Air Kotor
1 . 3 . 4 . 12 . 01	Instalasi Air Kotor
1 . 3 . 4 . 12 . 02	Instalasi Air Buangan Industri
1 . 3 . 4 . 12 . 03	Instalasi Air Buangan Pertanian

1 . 3 . 4 . 13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	
1 . 3 . 4 . 13 . 01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1 . 3 . 4 . 13 . 02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1 . 3 . 4 . 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 4 . 14 . 01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 4 . 15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1 . 3 . 4 . 15 . 01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1 . 3 . 4 . 15 . 02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1 . 3 . 4 . 15 . 03	Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)	
1 . 3 . 4 . 15 . 04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1 . 3 . 4 . 15 . 05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1 . 3 . 4 . 15 . 06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1 . 3 . 4 . 15 . 07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1 . 3 . 4 . 15 . 08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1 . 3 . 4 . 15 . 09	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	
1 . 3 . 4 . 15 . 10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1 . 3 . 4 . 15 . 11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)	
1 . 3 . 4 . 16	Instalasi Gardu Listrik	
1 . 3 . 4 . 16 . 01	Instalasi Gardu Listrik Induk	
1 . 3 . 4 . 16 . 02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1 . 3 . 4 . 16 . 03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1 . 3 . 4 . 17	Instalasi Pertahanan	
1 . 3 . 4 . 17 . 01	Instalasi Pertahanan Di Darat	
1 . 3 . 4 . 18	Instalasi Gas	
1 . 3 . 4 . 18 . 01	Instalasi Gardu Gas	
1 . 3 . 4 . 18 . 02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1 . 3 . 4 . 19	Instalasi Pengaman	
1 . 3 . 4 . 19 . 01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1 . 3 . 4 . 20	Jaringan Air Minum	
1 . 3 . 4 . 20 . 01	Jaringan Pembawa	
1 . 3 . 4 . 20 . 02	Jaringan Induk Distribusi	
1 . 3 . 4 . 20 . 03	Jaringan Cabang Distribusi	
1 . 3 . 4 . 20 . 04	Jaringan Sambungan ke rumah	
1 . 3 . 4 . 21	Jaringan Listrik	
1 . 3 . 4 . 21 . 01	Jaringan Transmisi	
1 . 3 . 4 . 21 . 02	Jaringan Distribusi	
1 . 3 . 4 . 22	Jaringan Telepon	
1 . 3 . 4 . 22 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	
1 . 3 . 4 . 22 . 02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
1 . 3 . 4 . 22 . 03	Jaringan Telepon Didalam Air	
1 . 3 . 4 . 23	Jaringan Gas	
1 . 3 . 4 . 23 . 01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1 . 3 . 4 . 23 . 02	Jaringan Pipa Distribusi	
1 . 3 . 4 . 23 . 03	Jaringan Pipa Dinas	
1 . 3 . 4 . 23 . 04	Jaringan BBM	
1 . 3 . 4 . 24	Jalan, Irigasi, dan Jaringan-BLUD	
1 . 3 . 4 . 24 . 01	Jalan, Irigasi, dan Jaringan-BLUD	
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya	D
1 . 3 . 5 . 01	Buku	
1 . 3 . 5 . 01 . 01	Buku Umum	
1 . 3 . 5 . 01 . 02	Buku Filsafat	
1 . 3 . 5 . 01 . 03	Buku Agama	
1 . 3 . 5 . 01 . 04	Buku Ilmu Sosial	
1 . 3 . 5 . 01 . 05	Buku Ilmu Bahasa	
1 . 3 . 5 . 01 . 06	Buku Matematika & Pengetahuan alam	
1 . 3 . 5 . 01 . 07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1 . 3 . 5 . 01 . 08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
1 . 3 . 5 . 01 . 09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	

1 . 3 . 5 . 02	Terbitan	
1 . 3 . 5 . 02 . 01	Terbitan Berkala	
1 . 3 . 5 . 02 . 02	Terbitan Buku Laporan	
1 . 3 . 5 . 03	Barang-Barang Perpustakaan	
1 . 3 . 5 . 03 . 01	Barang-Barang Perpustakaan Peta	
1 . 3 . 5 . 03 . 02	Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
1 . 3 . 5 . 03 . 03	Barang-Barang Perpustakaan Musik	
1 . 3 . 5 . 03 . 04	Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
1 . 3 . 5 . 03 . 05	Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
1 . 3 . 5 . 03 . 06	Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
1 . 3 . 5 . 03 . 07	Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording	
1 . 3 . 5 . 03 . 08	Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
1 . 3 . 5 . 03 . 09	Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
1 . 3 . 5 . 03 . 10	Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
1 . 3 . 5 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan	
1 . 3 . 5 . 04 . 01	Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
1 . 3 . 5 . 04 . 02	Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan	
1 . 3 . 5 . 04 . 03	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	
1 . 3 . 5 . 04 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	
1 . 3 . 5 . 04 . 05	Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan	
1 . 3 . 5 . 04 . 06	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen	
1 . 3 . 5 . 04 . 07	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah	
1 . 3 . 5 . 04 . 08	Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
1 . 3 . 5 . 05	Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 5 . 05 . 01	Alat Olah Raga Lainnya-Senam	
1 . 3 . 5 . 05 . 02	Alat Olah Raga Air	
1 . 3 . 5 . 05 . 03	Alat Olah Raga Udara	
1 . 3 . 5 . 05 . 04	Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 5 . 06	Hewan	
1 . 3 . 5 . 06 . 01	Binatang Ternak	
1 . 3 . 5 . 06 . 02	Binatang Unggas	
1 . 3 . 5 . 06 . 03	Binatang Melata	
1 . 3 . 5 . 06 . 04	Binatang Ikan	
1 . 3 . 5 . 06 . 05	Hewan Kebun Binatang	
1 . 3 . 5 . 06 . 06	Hewan Pengamanan	
1 . 3 . 5 . 07	Tanaman	
1 . 3 . 5 . 07 . 01	Tanaman Perkebunan	
1 . 3 . 5 . 07 . 02	Tanaman Holtikultura	
1 . 3 . 5 . 07 . 03	Tanaman Kehutanan	
1 . 3 . 5 . 07 . 04	Tanaman Hias	
1 . 3 . 5 . 07 . 05	Tanaman Obat dan Kosmetika	
1 . 3 . 5 . 08	Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 5 . 08 . 01	Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 5 . 09	Aset Tetap Lainnya-BLUD	
1 . 3 . 5 . 09 . 01	Aset Tetap Lainnya-BLUD	
1 . 3 . 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	D
1 . 3 . 6 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan	
1 . 3 . 6 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung	
1 . 3 . 6 . 01 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Emplasmen	
1 . 3 . 6 . 01 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kuburan	
1 . 3 . 6 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian	
1 . 3 . 6 . 02 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1 . 3 . 6 . 02 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan	
1 . 3 . 6 . 02 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Ladang	
1 . 3 . 6 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 6 . 03 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan	

1 . 3 . 6 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran
1 . 3 . 6 . 04 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1 . 3 . 6 . 04 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1 . 3 . 6 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan
1 . 3 . 6 . 05 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Lebat
1 . 3 . 6 . 05 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Belukar
1 . 3 . 6 . 05 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Tanaman Jenis
1 . 3 . 6 . 05 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1 . 3 . 6 . 05 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1 . 3 . 6 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan
1 . 3 . 6 . 06 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Tambak
1 . 3 . 6 . 06 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Air Tawar
1 . 3 . 6 . 06 . 03	
1 . 3 . 6 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau/Rawa
1 . 3 . 6 . 07 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rawa
1 . 3 . 6 . 07 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau
1 . 3 . 6 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak
1 . 3 . 6 . 08 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus
1 . 3 . 6 . 08 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rusak
1 . 3 . 6 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
1 . 3 . 6 . 09 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang
1 . 3 . 6 . 09 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Padang Rumput
1 . 3 . 6 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain
1 . 3 . 6 . 10 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Penggalian
1 . 3 . 6 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
1 . 3 . 6 . 11 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1 . 3 . 6 . 11 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1 . 3 . 6 . 11 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Industri
1 . 3 . 6 . 11 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1 . 3 . 6 . 11 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kosong
1 . 3 . 6 . 11 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Peternakan
1 . 3 . 6 . 11 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Pengairan
1 . 3 . 6 . 11 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1 . 3 . 6 . 11 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1 . 3 . 6 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan
1 . 3 . 6 . 12 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertambangan
1 . 3 . 6 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1 . 3 . 6 . 13 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Olah Raga
1 . 3 . 6 . 13 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Parkir
1 . 3 . 6 . 13 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
1 . 3 . 6 . 13 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1 . 3 . 6 . 13 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1 . 3 . 6 . 13 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Terbang
1 . 3 . 6 . 13 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
1 . 3 . 6 . 13 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Air
1 . 3 . 6 . 13 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1 . 3 . 6 . 13 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1 . 3 . 6 . 13 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1 . 3 . 6 . 13 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1 . 3 . 6 . 13 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah

1 . 3 . 6 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat
1 . 3 . 6 . 14 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Tractor
1 . 3 . 6 . 14 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Grader
1 . 3 . 6 . 14 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Excavator
1 . 3 . 6 . 14 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver
1 . 3 . 6 . 14 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Hauler
1 . 3 . 6 . 14 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment
1 . 3 . 6 . 14 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment
1 . 3 . 6 . 14 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment
1 . 3 . 6 . 14 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Loader
1 . 3 . 6 . 14 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat
1 . 3 . 6 . 14 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses
1 . 3 . 6 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung
1 . 3 . 6 . 15 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Dredger
1 . 3 . 6 . 15 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator
1 . 3 . 6 . 15 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger
1 . 3 . 6 . 15 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik
1 . 3 . 6 . 15 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung
1 . 3 . 6 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu
1 . 3 . 6 . 16 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Penarik
1 . 3 . 6 . 16 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Feeder
1 . 3 . 6 . 16 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Compressor
1 . 3 . 6 . 16 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set
1 . 3 . 6 . 16 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pompa
1 . 3 . 6 . 16 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Mesin Bor
1 . 3 . 6 . 16 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan
1 . 3 . 6 . 16 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor
1 . 3 . 6 . 16 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1 . 3 . 6 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1 . 3 . 6 . 17 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1 . 3 . 6 . 17 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Penumpang
1 . 3 . 6 . 17 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1 . 3 . 6 . 17 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Khusus
1 . 3 . 6 . 17 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1 . 3 . 6 . 17 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1 . 3 . 6 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1 . 3 . 6 . 18 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1 . 3 . 6 . 18 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1 . 3 . 6 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor
1 . 3 . 6 . 19 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1 . 3 . 6 . 19 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1 . 3 . 6 . 19 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1 . 3 . 6 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1 . 3 . 6 . 20 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1 . 3 . 6 . 20 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1 . 3 . 6 . 20 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus

1 . 3 . 6 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara
1 . 3 . 6 . 21 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kapal Terbang
1 . 3 . 6 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin
1 . 3 . 6 . 22 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1 . 3 . 6 . 22 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1 . 3 . 6 . 22 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik
1 . 3 . 6 . 22 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service
1 . 3 . 6 . 22 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat Bermesin
1 . 3 . 6 . 22 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kayu
1 . 3 . 6 . 22 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Khusus
1 . 3 . 6 . 22 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Las
1 . 3 . 6 . 22 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pabrik Es
1 . 3 . 6 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin
1 . 3 . 6 . 23 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1 . 3 . 6 . 23 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik
1 . 3 . 6 . 23 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service
1 . 3 . 6 . 23 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat
1 . 3 . 6 . 23 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Standar (Standart Tool)
1 . 3 . 6 . 23 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Khusus (Special Tool)
1 . 3 . 6 . 23 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kerja
1 . 3 . 6 . 23 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang-tukang Besi
1 . 3 . 6 . 23 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kayu
1 . 3 . 6 . 23 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kulit
1 . 3 . 6 . 23 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
1 . 3 . 6 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur
1 . 3 . 6 . 24 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur universal
1 . 3 . 6 . 24 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Intelegensia
1 . 3 . 6 . 24 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1 . 3 . 6 . 24 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
1 . 3 . 6 . 24 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Calibrasi
1 . 3 . 6 . 24 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Oscilloscope
1 . 3 . 6 . 24 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Universal Tester
1 . 3 . 6 . 24 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Pembanding
1 . 3 . 6 . 24 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Lainnya
1 . 3 . 6 . 24 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Timbangan/Blora
1 . 3 . 6 . 24 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Anak Timbangan/Biasa
1 . 3 . 6 . 24 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Kering
1 . 3 . 6 . 24 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1 . 3 . 6 . 24 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Latex/Getah Susu
1 . 3 . 6 . 24 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gelas Takar Berbagai Capacitas
1 . 3 . 6 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan
1 . 3 . 6 . 25 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1 . 3 . 6 . 25 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen/Pengolahan
1 . 3 . 6 . 25 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Peternakan
1 . 3 . 6 . 25 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1 . 3 . 6 . 25 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian
1 . 3 . 6 . 25 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proceasing
1 . 3 . 6 . 25 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pasca Panen
1 . 3 . 6 . 25 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi Perikanan
1 . 3 . 6 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1 . 3 . 6 . 26 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman
1 . 3 . 6 . 26 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen
1 . 3 . 6 . 26 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan
1 . 3 . 6 . 26 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium
1 . 3 . 6 . 26 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penangkap Ikan
1 . 3 . 6 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor
1 . 3 . 6 . 27 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Tik

1 . 3 . 6 . 27 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Hitung/Jumlah
1 . 3 . 6 . 27 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Reproduksi (Pengganda)
1 . 3 . 6 . 27 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1 . 3 . 6 . 27 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor Lainnya
1 . 3 . 6 . 28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga
1 . 3 . 6 . 28 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meubelair
1 . 3 . 6 . 28 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengukur Waktu
1 . 3 . 6 . 28 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pembersih
1 . 3 . 6 . 28 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pendingin
1 . 3 . 6 . 28 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Dapur
1 . 3 . 6 . 28 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1 . 3 . 6 . 28 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 . 3 . 6 . 29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer
1 . 3 . 6 . 29 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit/Jaringan
1 . 3 . 6 . 29 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Personal Komputer
1 . 3 . 6 . 29 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer Mainframe
1 . 3 . 6 . 29 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Mini Komputer
1 . 3 . 6 . 29 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Personal Komputer
1 . 3 . 6 . 29 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Jaringan
1 . 3 . 6 . 30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Kerja Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Rapat Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Kerja Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Rapat Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1 . 3 . 6 . 30 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lemari dan Arsip Pejabat
1 . 3 . 6 . 31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio
1 . 3 . 6 . 31 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Visual
1 . 3 . 6 . 31 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film
1 . 3 . 6 . 31 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film A
1 . 3 . 6 . 31 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Cetak
1 . 3 . 6 . 31 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Computing
1 . 3 . 6 . 31 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemetaan Ukur
1 . 3 . 6 . 32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi
1 . 3 . 6 . 32 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Telephone
1 . 3 . 6 . 32 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio SSB
1 . 3 . 6 . 32 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
1 . 3 . 6 . 32 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio VHF
1 . 3 . 6 . 32 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio UHF
1 . 3 . 6 . 32 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Sosial
1 . 3 . 6 . 32 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Sandi
1 . 3 . 6 . 33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar
1 . 3 . 6 . 33 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar MF/MW
1 . 3 . 6 . 33 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar HF/SW
1 . 3 . 6 . 33 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar VHF/FM
1 . 3 . 6 . 33 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar UHF
1 . 3 . 6 . 33 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar SHF
1 . 3 . 6 . 33 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena MF/MW
1 . 3 . 6 . 33 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena HF/SW
1 . 3 . 6 . 33 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena VHF/FM
1 . 3 . 6 . 33 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena UHF
1 . 3 . 6 . 33 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena SHF/Parabola
1 . 3 . 6 . 33 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/VHF
1 . 3 . 6 . 33 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/UHF
1 . 3 . 6 . 33 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/UHF
1 . 3 . 6 . 33 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/VHF
1 . 3 . 6 . 33 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe FPU
1 . 3 . 6 . 33 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe Terrestrial
1 . 3 . 6 . 33 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe TVRO

1 . 3 . 6 . 33 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dummy Load
1 . 3 . 6 . 33 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher Antena
1 . 3 . 6 . 33 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher/Menara Antena
1 . 3 . 6 . 33 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Feeder
1 . 3 . 6 . 33 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Humidity Control
1 . 3 . 6 . 33 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Program Input Equipment
1 . 3 . 6 . 33 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena Penerima VHF
1 . 3 . 6 . 34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran
1 . 3 . 6 . 34 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Umum
1 . 3 . 6 . 34 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gigi
1 . 3 . 6 . 34 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1 . 3 . 6 . 34 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mata
1 . 3 . 6 . 34 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran T.H.T
1 . 3 . 6 . 34 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rotgen
1 . 3 . 6 . 34 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Farmasi
1 . 3 . 6 . 34 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bedah
1 . 3 . 6 . 34 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1 . 3 . 6 . 34 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
1 . 3 . 6 . 34 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mortuary
1 . 3 . 6 . 34 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Anak
1 . 3 . 6 . 34 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Poliklinik Set
1 . 3 . 6 . 34 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
1 . 3 . 6 . 34 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1 . 3 . 6 . 34 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jantung
1 . 3 . 6 . 34 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Nuklir
1 . 3 . 6 . 34 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Radiologi
1 . 3 . 6 . 34 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1 . 3 . 6 . 34 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
1 . 3 . 6 . 34 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jiwa
1 . 3 . 6 . 34 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Hewan
1 . 3 . 6 . 35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan
1 . 3 . 6 . 35 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Perawatan
1 . 3 . 6 . 35 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1 . 3 . 6 . 35 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Laut
1 . 3 . 6 . 35 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Udara
1 . 3 . 6 . 35 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1 . 3 . 6 . 35 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Olahraga
1 . 3 . 6 . 36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit Laboratorium
1 . 3 . 6 . 36 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia Air
1 . 3 . 6 . 36 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi
1 . 3 . 6 . 36 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
1 . 3 . 6 . 36 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1 . 3 . 6 . 36 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
1 . 3 . 6 . 36 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1 . 3 . 6 . 36 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1 . 3 . 6 . 36 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
1 . 3 . 6 . 36 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Cokok Tanam
1 . 3 . 6 . 36 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1 . 3 . 6 . 36 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1 . 3 . 6 . 36 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum
1 . 3 . 6 . 36 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum A
1 . 3 . 6 . 36 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kedokteran
1 . 3 . 6 . 36 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi
1 . 3 . 6 . 36 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia
1 . 3 . 6 . 36 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi A

1 . 3 . 6 . 36 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Patologi
1 . 3 . 6 . 36 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Immunologi
1 . 3 . 6 . 36 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hematologi
1 . 3 . 6 . 36 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Film
1 . 3 . 6 . 36 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Makanan
1 . 3 . 6 . 36 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1 . 3 . 6 . 36 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Farmasi
1 . 3 . 6 . 36 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika
1 . 3 . 6 . 36 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
1 . 3 . 6 . 36 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Klimatologi
1 . 3 . 6 . 36 . 28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
1 . 3 . 6 . 36 . 29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pasir
1 . 3 . 6 . 36 . 30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1 . 3 . 6 . 36 . 31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1 . 3 . 6 . 36 . 32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Metalography
1 . 3 . 6 . 36 . 33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1 . 3 . 6 . 36 . 34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1 . 3 . 6 . 36 . 35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1 . 3 . 6 . 36 . 36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Matrologie
1 . 3 . 6 . 36 . 37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1 . 3 . 6 . 36 . 38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1 . 3 . 6 . 36 . 39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1 . 3 . 6 . 36 . 40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
1 . 3 . 6 . 36 . 41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1 . 3 . 6 . 36 . 42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1 . 3 . 6 . 36 . 43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1 . 3 . 6 . 36 . 44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Keramik
1 . 3 . 6 . 36 . 45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1 . 3 . 6 . 36 . 46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian
1 . 3 . 6 . 36 . 47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian A
1 . 3 . 6 . 36 . 48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian B
1 . 3 . 6 . 36 . 49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1 . 3 . 6 . 36 . 50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Energi Surya
1 . 3 . 6 . 36 . 51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1 . 3 . 6 . 36 . 52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Oceanografi
1 . 3 . 6 . 36 . 53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1 . 3 . 6 . 36 . 54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1 . 3 . 6 . 36 . 55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi
1 . 3 . 6 . 36 . 56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Geofisika
1 . 3 . 6 . 36 . 57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Tambang
1 . 3 . 6 . 36 . 58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1 . 3 . 6 . 36 . 59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Industri
1 . 3 . 6 . 36 . 60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1 . 3 . 6 . 36 . 61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Kearsipan
1 . 3 . 6 . 36 . 62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1 . 3 . 6 . 36 . 63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lainnya
1 . 3 . 6 . 36 . 64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A

1 . 3 . 6 . 37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1 . 3 . 6 . 37 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1 . 3 . 6 . 37 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika
1 . 3 . 6 . 37 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar
1 . 3 . 6 . 37 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan
1 . 3 . 6 . 37 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah
1 . 3 . 6 . 37 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas
1 . 3 . 6 . 37 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS
1 . 3 . 6 . 37 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam
1 . 3 . 6 . 37 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan
1 . 3 . 6 . 37 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian
1 . 3 . 6 . 37 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga
1 . 3 . 6 . 37 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP
1 . 3 . 6 . 37 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1 . 3 . 6 . 38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1 . 3 . 6 . 38 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument
1 . 3 . 6 . 38 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor
1 . 3 . 6 . 38 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool
1 . 3 . 6 . 38 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A
1 . 3 . 6 . 38 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils
1 . 3 . 6 . 38 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment
1 . 3 . 6 . 39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1 . 3 . 6 . 39 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector
1 . 3 . 6 . 39 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scentific
1 . 3 . 6 . 39 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System
1 . 3 . 6 . 39 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display
1 . 3 . 6 . 39 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply
1 . 3 . 6 . 39 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device
1 . 3 . 6 . 39 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics
1 . 3 . 6 . 39 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator
1 . 3 . 6 . 39 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System
1 . 3 . 6 . 40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1 . 3 . 6 . 40 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan
1 . 3 . 6 . 40 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja
1 . 3 . 6 . 40 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Proteksi Lingkungan
1 . 3 . 6 . 40 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment
1 . 3 . 6 . 40 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi

1 . 3 . 6 . 41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1 . 3 . 6 . 41 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application Equipment
1 . 3 . 6 . 41 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Destructive Test (NDT) Device
1 . 3 . 6 . 41 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1 . 3 . 6 . 41 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Hidrologi
1 . 3 . 6 . 42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1 . 3 . 6 . 42 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1 . 3 . 6 . 42 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
1 . 3 . 6 . 42 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1 . 3 . 6 . 42 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Lingkungan
1 . 3 . 6 . 42 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang
1 . 3 . 6 . 43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1 . 3 . 6 . 43 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
1 . 3 . 6 . 43 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
1 . 3 . 6 . 43 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and Analyzing System
1 . 3 . 6 . 43 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel
1 . 3 . 6 . 43 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes
1 . 3 . 6 . 43 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum
1 . 3 . 6 . 43 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop
1 . 3 . 6 . 43 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop
1 . 3 . 6 . 43 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop
1 . 3 . 6 . 43 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1 . 3 . 6 . 43 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop
1 . 3 . 6 . 43 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1 . 3 . 6 . 43 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop
1 . 3 . 6 . 43 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB
1 . 3 . 6 . 43 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment
1 . 3 . 6 . 44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api
1 . 3 . 6 . 44 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Genggam
1 . 3 . 6 . 44 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Pinggang
1 . 3 . 6 . 44 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1 . 3 . 6 . 44 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senapan Mesin
1 . 3 . 6 . 44 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Mortir
1 . 3 . 6 . 44 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Anti Lapis Baja
1 . 3 . 6 . 44 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Medan (Armed)
1 . 3 . 6 . 44 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
1 . 3 . 6 . 44 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Peluru Kendali/Rudal
1 . 3 . 6 . 44 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Kavaleri
1 . 3 . 6 . 44 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Lain-lain
1 . 3 . 6 . 45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api
1 . 3 . 6 . 45 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan
1 . 3 . 6 . 45 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Senjata Api

1 . 3 . 6 . 46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi
1 . 3 . 6 . 46 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Umum
1 . 3 . 6 . 46 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Darat
1 . 3 . 6 . 47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar
1 . 3 . 6 . 47 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar Laser
1 . 3 . 6 . 48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan
1 . 3 . 6 . 48 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Kemanan
1 . 3 . 6 . 48 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Perlindungan
1 . 3 . 6 . 49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1 . 3 . 6 . 49 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor
1 . 3 . 6 . 49 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang
1 . 3 . 6 . 49 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1 . 3 . 6 . 49 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Instalasi
1 . 3 . 6 . 49 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium
1 . 3 . 6 . 49 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan
1 . 3 . 6 . 49 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Oceanarium/Opervatorium
1 . 3 . 6 . 49 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1 . 3 . 6 . 49 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1 . 3 . 6 . 49 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1 . 3 . 6 . 49 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1 . 3 . 6 . 49 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1 . 3 . 6 . 49 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1 . 3 . 6 . 49 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
1 . 3 . 6 . 49 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1 . 3 . 6 . 49 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pabrik
1 . 3 . 6 . 49 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Stasiun Bus
1 . 3 . 6 . 49 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1 . 3 . 6 . 49 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Perpustakaan
1 . 3 . 6 . 49 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Museum
1 . 3 . 6 . 49 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1 . 3 . 6 . 49 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengujian Kelaikan
1 . 3 . 6 . 49 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
1 . 3 . 6 . 49 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rumah Tahanan
1 . 3 . 6 . 49 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kramatorium
1 . 3 . 6 . 49 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1 . 3 . 6 . 49 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1 . 3 . 6 . 50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1 . 3 . 6 . 50 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan I
1 . 3 . 6 . 50 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan II
1 . 3 . 6 . 50 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan III
1 . 3 . 6 . 50 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1 . 3 . 6 . 50 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Asrama
1 . 3 . 6 . 50 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hotel
1 . 3 . 6 . 50 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Motel
1 . 3 . 6 . 50 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun
1 . 3 . 6 . 51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara
1 . 3 . 6 . 51 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1 . 3 . 6 . 51 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai
1 . 3 . 6 . 51 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi

1 . 3 . 6 . 52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah
1 . 3 . 6 . 52 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Istana Peringatan
1 . 3 . 6 . 52 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Adat
1 . 3 . 6 . 52 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Peninggalan Sejarah
1 . 3 . 6 . 52 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Makam Sejarah
1 . 3 . 6 . 52 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1 . 3 . 6 . 53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan
1 . 3 . 6 . 53 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Kemerdekaan
1 . 3 . 6 . 53 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan
1 . 3 . 6 . 53 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan Lainnya
1 . 3 . 6 . 54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Candi
1 . 3 . 6 . 54 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Hindhu
1 . 3 . 6 . 54 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Budha
1 . 3 . 6 . 54 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Lainnya
1 . 3 . 6 . 55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
1 . 3 . 6 . 55 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah Lainnya
1 . 3 . 6 . 56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1 . 3 . 6 . 56 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan
1 . 3 . 6 . 56 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas
1 . 3 . 6 . 57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu
1 . 3 . 6 . 57 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1 . 3 . 6 . 57 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Tidak Bersuar
1 . 3 . 6 . 58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1 . 3 . 6 . 58 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light
1 . 3 . 6 . 58 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1 . 3 . 6 . 58 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light
1 . 3 . 6 . 58 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)
1 . 3 . 6 . 58 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal
1 . 3 . 6 . 58 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light
1 . 3 . 6 . 59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan
1 . 3 . 6 . 59 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Negara/Nasional
1 . 3 . 6 . 59 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Propinsi
1 . 3 . 6 . 59 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota
1 . 3 . 6 . 59 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa
1 . 3 . 6 . 59 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus
1 . 3 . 6 . 59 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Tol
1 . 3 . 6 . 59 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kereta
1 . 3 . 6 . 59 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
1 . 3 . 6 . 60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan
1 . 3 . 6 . 60 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Negara/Nasional
1 . 3 . 6 . 60 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Propinsi
1 . 3 . 6 . 60 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota
1 . 3 . 6 . 60 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa
1 . 3 . 6 . 60 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Khusus
1 . 3 . 6 . 60 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Tol
1 . 3 . 6 . 60 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1 . 3 . 6 . 60 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1 . 3 . 6 . 60 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Penyeberangan
1 . 3 . 6 . 61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi
1 . 3 . 6 . 61 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi
1 . 3 . 6 . 61 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Irigasi
1 . 3 . 6 . 61 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi
1 . 3 . 6 . 61 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Irigasi
1 . 3 . 6 . 61 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Irigasi
1 . 3 . 6 . 61 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi

1 . 3 . 6 . 62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 62 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa
1 . 3 . 6 . 63 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1 . 3 . 6 . 63 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1 . 3 . 6 . 63 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1 . 3 . 6 . 63 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1 . 3 . 6 . 63 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1 . 3 . 6 . 63 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1 . 3 . 6 . 63 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1 . 3 . 6 . 64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1 . 3 . 6 . 64 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1 . 3 . 6 . 64 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1 . 3 . 6 . 64 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman
1 . 3 . 6 . 64 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1 . 3 . 6 . 64 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1 . 3 . 6 . 64 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1 . 3 . 6 . 65	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1 . 3 . 6 . 65 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 6 . 65 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 6 . 65 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 6 . 65 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 6 . 65 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 6 . 65 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1 . 3 . 6 . 66	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku
1 . 3 . 6 . 66 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1 . 3 . 6 . 66 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1 . 3 . 6 . 66 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih
1 . 3 . 6 . 66 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1 . 3 . 6 . 66 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1 . 3 . 6 . 67	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor
1 . 3 . 6 . 67 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Kotor
1 . 3 . 6 . 67 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Kotor
1 . 3 . 6 . 67 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
1 . 3 . 6 . 67 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Air Kotor
1 . 3 . 6 . 67 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor

1 . 3 . 6 . 68	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air
1 . 3 . 6 . 68 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Laut
1 . 3 . 6 . 68 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Tawar
1 . 3 . 6 . 69	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1 . 3 . 6 . 69 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Muka Tanah
1 . 3 . 6 . 69 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Sumber /Mata Air
1 . 3 . 6 . 69 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dalam
1 . 3 . 6 . 69 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dangkal
1 . 3 . 6 . 69 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1 . 3 . 6 . 70	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor
1 . 3 . 6 . 70 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor
1 . 3 . 6 . 70 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Industri
1 . 3 . 6 . 70 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Pertanian
1 . 3 . 6 . 71	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah
1 . 3 . 6 . 71 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1 . 3 . 6 . 71 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1 . 3 . 6 . 72	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1 . 3 . 6 . 72 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1 . 3 . 6 . 73	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik
1 . 3 . 6 . 73 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1 . 3 . 6 . 73 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1 . 3 . 6 . 73 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1 . 3 . 6 . 73 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1 . 3 . 6 . 73 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1 . 3 . 6 . 73 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1 . 3 . 6 . 73 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1 . 3 . 6 . 73 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1 . 3 . 6 . 73 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1 . 3 . 6 . 73 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1 . 3 . 6 . 73 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1 . 3 . 6 . 74	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik
1 . 3 . 6 . 74 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Induk
1 . 3 . 6 . 74 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1 . 3 . 6 . 74 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1 . 3 . 6 . 75	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan
1 . 3 . 6 . 75 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan Di Darat
1 . 3 . 6 . 76	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas
1 . 3 . 6 . 76 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Gas
1 . 3 . 6 . 76 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
1 . 3 . 6 . 77	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman
1 . 3 . 6 . 77 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1 . 3 . 6 . 78	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum
1 . 3 . 6 . 78 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pembawa
1 . 3 . 6 . 78 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi
1 . 3 . 6 . 78 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Cabang Distribusi
1 . 3 . 6 . 78 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Sambungan ke rumah

1 . 3 . 6 . 79	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik
1 . 3 . 6 . 79 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Transmisi
1 . 3 . 6 . 79 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Distribusi
1 . 3 . 6 . 80	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon
1 . 3 . 6 . 80 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
1 . 3 . 6 . 80 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1 . 3 . 6 . 80 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Didalam Air
1 . 3 . 6 . 81	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas
1 . 3 . 6 . 81 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
1 . 3 . 6 . 81 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Distribusi
1 . 3 . 6 . 81 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dinas
1 . 3 . 6 . 81 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan BBM
1 . 3 . 6 . 82	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku
1 . 3 . 6 . 82 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Umum
1 . 3 . 6 . 82 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Filsafat
1 . 3 . 6 . 82 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Agama
1 . 3 . 6 . 82 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Sosial
1 . 3 . 6 . 82 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Bahasa
1 . 3 . 6 . 82 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
1 . 3 . 6 . 82 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1 . 3 . 6 . 82 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1 . 3 . 6 . 82 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
1 . 3 . 6 . 83	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan
1 . 3 . 6 . 83 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Berkala
1 . 3 . 6 . 83 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Buku Laporan
1 . 3 . 6 . 84	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan
1 . 3 . 6 . 84 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
1 . 3 . 6 . 84 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
1 . 3 . 6 . 84 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
1 . 3 . 6 . 84 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
1 . 3 . 6 . 84 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
1 . 3 . 6 . 84 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
1 . 3 . 6 . 84 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording
1 . 3 . 6 . 84 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
1 . 3 . 6 . 84 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
1 . 3 . 6 . 84 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
1 . 3 . 6 . 85	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan
1 . 3 . 6 . 85 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan
1 . 3 . 6 . 85 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan
1 . 3 . 6 . 85 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian
1 . 3 . 6 . 85 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga
1 . 3 . 6 . 85 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan
1 . 3 . 6 . 85 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen
1 . 3 . 6 . 85 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah
1 . 3 . 6 . 85 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan

1 . 3 . 6 . 86	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 6 . 86 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya-Senam	
1 . 3 . 6 . 86 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Air	
1 . 3 . 6 . 86 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Udara	
1 . 3 . 6 . 86 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 6 . 87	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan	
1 . 3 . 6 . 87 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ternak	
1 . 3 . 6 . 87 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Unggas	
1 . 3 . 6 . 87 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Melata	
1 . 3 . 6 . 87 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ikan	
1 . 3 . 6 . 87 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Kebun Binatang	
1 . 3 . 6 . 87 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Pengamanan	
1 . 3 . 6 . 88	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman	
1 . 3 . 6 . 88 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Perkebunan	
1 . 3 . 6 . 88 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Holtikultura	
1 . 3 . 6 . 88 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Kehutanan	
1 . 3 . 6 . 88 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Hias	
1 . 3 . 6 . 88 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Obat dan Kosmetika	
1 . 3 . 6 . 89	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 6 . 89 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 6 . 90	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap BLUD	
1 . 3 . 6 . 90 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap BLUD - Tanah	
1 . 3 . 6 . 90 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap BLUD - Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 6 . 90 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap BLUD - Gedung dan Bangunan	
1 . 3 . 6 . 90 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap BLUD - Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1 . 3 . 6 . 90 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap BLUD - Aset Tetap Lainnya	
1 . 3 . 6 . 91	kontruksi dalam pekerjaan Aset Lainnya	
1 . 3 . 6 . 91 . 01	KDP - AL Perangkat Lunak	
1 . 3 . 6 . 91 . 02	KDP - AL Lisensi	
1 . 3 . 6 . 91 . 03	KDP- AL Hak Cipta	
1 . 3 . 6 . 91 . 04	KDP - AL Kajian	
1 . 3 . 6 . 91 . 05	KDP - AL Warisan Budaya	
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan	D
1 . 3 . 7 . 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
1 . 3 . 7 . 01 . 03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	
1 . 3 . 7 . 01 . 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
1 . 3 . 7 . 01 . 09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
1 . 3 . 7 . 01 . 10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
1 . 3 . 7 . 01 . 11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	
1 . 3 . 7 . 01 . 12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	
1 . 3 . 7 . 01 . 13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1 . 3 . 7 . 01 . 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	
1 . 3 . 7 . 01 . 15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	
1 . 3 . 7 . 01 . 16	Akumulasi Penyusutan Komputer	
1 . 3 . 7 . 01 . 17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1 . 3 . 7 . 01 . 18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	
1 . 3 . 7 . 01 . 19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	
1 . 3 . 7 . 01 . 20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	
1 . 3 . 7 . 01 . 21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	
1 . 3 . 7 . 01 . 22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	
1 . 3 . 7 . 01 . 23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	

1 . 3 . 7 . 01 . 24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1 . 3 . 7 . 01 . 25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1 . 3 . 7 . 01 . 26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1 . 3 . 7 . 01 . 27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1 . 3 . 7 . 01 . 28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1 . 3 . 7 . 01 . 29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1 . 3 . 7 . 01 . 30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1 . 3 . 7 . 01 . 31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api	
1 . 3 . 7 . 01 . 32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
1 . 3 . 7 . 01 . 33	Akumulasi Penyusutan Amunisi	
1 . 3 . 7 . 01 . 34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar	
1 . 3 . 7 . 01 . 35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
1 . 3 . 7 . 01 . 36	Akumulasi Penyusutan Aset tetap.....	
1 . 3 . 7 . 02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1 . 3 . 7 . 02 . 02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 7 . 02 . 03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	
1 . 3 . 7 . 02 . 04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 7 . 02 . 05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
1 . 3 . 7 . 02 . 06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi	
1 . 3 . 7 . 02 . 07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
1 . 3 . 7 . 02 . 08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 . 3 . 7 . 02 . 09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
1 . 3 . 7 . 02 . 10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1 . 3 . 7 . 03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan	
1 . 3 . 7 . 03 . 02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	
1 . 3 . 7 . 03 . 03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
1 . 3 . 7 . 03 . 04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
1 . 3 . 7 . 03 . 05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa	
1 . 3 . 7 . 03 . 06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1 . 3 . 7 . 03 . 07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1 . 3 . 7 . 03 . 08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
1 . 3 . 7 . 03 . 09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	
1 . 3 . 7 . 03 . 10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	
1 . 3 . 7 . 03 . 11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1 . 3 . 7 . 03 . 12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	
1 . 3 . 7 . 03 . 13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
1 . 3 . 7 . 03 . 14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 7 . 03 . 15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
1 . 3 . 7 . 03 . 16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
1 . 3 . 7 . 03 . 17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan	
1 . 3 . 7 . 03 . 18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas	
1 . 3 . 7 . 03 . 19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	
1 . 3 . 7 . 03 . 20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	
1 . 3 . 7 . 03 . 21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	
1 . 3 . 7 . 03 . 22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	
1 . 3 . 7 . 03 . 23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	
1 . 3 . 7 . 04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1 . 3 . 7 . 04 . 01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 7 . 04 . 02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1 . 3 . 7 . 05	Akumulasi penyusutan aset tetap.....	
1 . 3 . 7 . 05 . 06	akumulasi penyusutan Aset tetap.....	
1 . 4	DANA CADANGAN	
1 . 4 . 1	Dana Cadangan	D
1 . 4 . 1 . 01	Dana Cadangan	
1 . 4 . 1 . 01 . 01	Dana Cadangan	

1 . 5	ASET LAINNYA	
1 . 5 . 1	Tagihan Jangka Panjang	D
1 . 5 . 1 . 01	Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 5 . 1 . 01 . 01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1 . 5 . 1 . 01 . 02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1 . 5 . 1 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1 . 5 . 1 . 02 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1 . 5 . 1 . 02 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	
1 . 5 . 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	D
1 . 5 . 2 . 01	Sewa	
1 . 5 . 2 . 01 . 01	Sewa	
1 . 5 . 2 . 02	Kerjasama Pemanfaatan	
1 . 5 . 2 . 02 . 01	Kerjasama Pemanfaatan	
1 . 5 . 2 . 03	Bangun guna serah	
1 . 5 . 2 . 03 . 01	Bangun guna serah	
1 . 5 . 2 . 04	Bangun serah guna	
1 . 5 . 2 . 04 . 01	Bangun serah guna	
1 . 5 . 3	Aset Tidak Berwujud	D
1 . 5 . 3 . 01	Goodwill	
1 . 5 . 3 . 01 . 01	Goodwill	
1 . 5 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 02	Lisensi dan frenchise	
1 . 5 . 3 . 02 . 01	Lisensi	
1 . 5 . 3 . 02 . 02	Frenchise	
1 . 5 . 3 . 02 . 03		
1 . 5 . 3 . 03	Hak Cipta	
1 . 5 . 3 . 03 . 01	Hak Cipta	
1 . 5 . 3 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 04	Paten	
1 . 5 . 3 . 04 . 01	Paten	
1 . 5 . 3 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 05	Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1 . 5 . 3 . 05 . 01	Software	
1 . 5 . 3 . 05 . 02	Kajian (DED)	
1 . 5 . 3 . 05 . 03	Warisan Budaya	
1 . 5 . 3 . 06	.	
1 . 5 . 3 . 06 . 01	Akumulasi Amortisasi Goodwill	
1 . 5 . 3 . 06 . 02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise	
1 . 5 . 3 . 06 . 03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	
1 . 5 . 3 . 06 . 04	Akumulasi Amortisasi Paten	
1 . 5 . 3 . 06 . 05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1 . 5 . 3 . 07	Perangkat Lunak	
1 . 5 . 3 . 07 . 01	Perangkat Lunak	
1 . 5 . 3 . 08		
1 . 5 . 3 . 08 . 01		
1 . 5 . 4	Aset Lain-lain	D
1 . 5 . 4 . 01	Aset Lain-lain	
1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-lain.....	
1 . 5 . 4 . 01 . 02	Warisan Budaya	
1 . 5 . 4 . 01 . 03	dst	
1 . 5 . 4 . 02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
1 . 5 . 4 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	
1 . 5 . 4 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 6	Tuntutan Perbendaharaan	D

1 . 5 . 6 . 01	Tuntutan Perbendaharaan	
1 . 5 . 6 . 01 . 01	Tuntutan Perbendaharaan	
1 . 5 . 7	Aset Non Lancar	D
1 . 5 . 7 . 01	Dana Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan	
1 . 5 . 7 . 01 . 01	Dana Reklamasi	
1 . 5 . 7 . 01 . 02	Jaminan Kesungguhan	
1 . 5 . 8	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	D
1 . 5 . 8 . 01	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
1 . 5 . 8 . 01 . 01	Amortisasi Goodwill	
1 . 5 . 8 . 01 . 02	Amortisasi Lisensi dan Frenchise	
1 . 5 . 8 . 01 . 03	Amortisasi Hak Cipta	
1 . 5 . 8 . 01 . 04	Amortisasi Paten	
1 . 5 . 8 . 01 . 05	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
1 . 5 . 8 . 01 . 06	Amortisasi Perangkat Lunak	
1 . 5 . 8 . 01 . 07	Amortisasi Kajian (DED)	
1 . 5 . 9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	D
1 . 5 . 9 . 01	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
1 . 5 . 9 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
1 . 5 . 10	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	D
1 . 5 . 10 . 01	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 5 . 10 . 01 . 01	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 5 . 11	Penyisihan Tagihan Ganti Rugi	D
1 . 5 . 11 . 01	Penyisihan Tagihan Ganti Rugi	
1 . 5 . 11 . 01 . 01	Penyisihan Tagihan Ganti Rugi	
2	KEWAJIBAN	
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	K
2 . 1 . 1 . 01	Utang Taspen	
2 . 1 . 1 . 01 . 01	Utang Taspen	
2 . 1 . 1 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2 . 1 . 1 . 02 . 01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2 . 1 . 1 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 03	Utang PPh Pusat	
2 . 1 . 1 . 03 . 01	Utang PPh 21	
2 . 1 . 1 . 03 . 02	Utang PPh 22	
2 . 1 . 1 . 03 . 03	Utang PPh 23	
2 . 1 . 1 . 03 . 04	Utang PPh 25	
2 . 1 . 1 . 03 . 05	Utang PPh Ps 4 (2)	
2 . 1 . 1 . 03 . 06	Utang PPh 15	
2 . 1 . 1 . 03 . 07	Utang PPh 26	
2 . 1 . 1 . 04	Utang PPN Pusat	
2 . 1 . 1 . 04 . 01	Utang PPN Pusat	
2 . 1 . 1 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 05	Utang Taperum	
2 . 1 . 1 . 05 . 01	Utang Taperum	
2 . 1 . 1 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 06	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2 . 1 . 1 . 06 . 01	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2 . 1 . 1 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2 . 1 . 1 . 07 . 01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2 . 1 . 1 . 07 . 02	Utang Sewa Rumah	
2 . 1 . 1 . 07 . 03	Utang Beras (BULOG)	
2 . 1 . 1 . 08	Utang Jaminan	
2 . 1 . 1 . 08 . 01	Utang Jaminan	
2 . 1 . 1 . 08 . 02	Dst.....	

2 . 1 . 1 . 09	Utang Iuran Wajib Pegawai (2%)	
2 . 1 . 1 . 09 . 10	Utang IWP (2%)	
2 . 1 . 1 . 10	Utang Pajak Daerah (makan & minum)	
2 . 1 . 1 . 10 . 01	Utang Pajak Daerah (makan & minum)	
2 . 1 . 1 . 11	Penerimaan PFK - IWP (2%)	
2 . 1 . 1 . 11 . 01	Penerimaan PFK - IWP (2%)	
2 . 1 . 1 . 12	Pengeluaran PFK - PPh Pusat	
2 . 1 . 1 . 12 . 06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15	
2 . 1 . 1 . 12 . 07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 26	
2 . 1 . 1 . 13	Pengeluaran PFK - Lainnya	
2 . 1 . 1 . 13 . 03	Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)	
2 . 1 . 1 . 14	Pengeluaran PFK - Pajak Daerah (makan & minum)	
2 . 1 . 1 . 14 . 01	Pengeluaran PFK - Pajak Daerah (makan & minum)	
2 . 1 . 1 . 15	Pengeluaran PFK - IWP (2%)	
2 . 1 . 1 . 15 . 01	Pengeluaran PFK - IWP (2%)	
2 . 1 . 2	Utang Bunga	K
2 . 1 . 2 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2 . 1 . 2 . 01 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 02	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 2 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	
2 . 1 . 2 . 03 . 01	Utang Bunga Kepada BUMN	
2 . 1 . 2 . 03 . 02	Utang Bunga Kepada BUMD	
2 . 1 . 2 . 03 . 03	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 01	Utang Bunga kepada Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 05	Utang Bunga Obligasi	
2 . 1 . 2 . 05 . 01	Utang Bunga Obligasi.....	
2 . 1 . 2 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 06	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 07	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 01	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	K
2 . 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 03	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 04	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 05	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 02	Dst.....	

2 . 1 . 4	Pendapatan Diterima Dimuka	K
2 . 1 . 4 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Diterima Dimuka-dari Pajak	
2 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Diterima Dimuka-dari Retribusi	
2 . 1 . 5	Utang Beban	K
2 . 1 . 5 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 02	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 03	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 03 . 01	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 04	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 04 . 01	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 05	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 05 . 01	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 06	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 06 . 01	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 07	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 07 . 01	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 08	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 5 . 08 . 01	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 5 . 09	Utang Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2 . 1 . 5 . 09 . 01	Utang beban belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupatn / kota...	
2 . 1 . 5 . 09 . 02	Utang beban belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa...	
2 . 1 . 5 . 10	Utang Beban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	
2 . 1 . 5 . 10 . 01	Utang Beban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	K
2 . 1 . 6 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	
2 . 1 . 6 . 01 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	
2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	
2 . 1 . 6 . 01 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
2 . 1 . 6 . 01 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah	
2 . 1 . 6 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	
2 . 1 . 6 . 02 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
2 . 1 . 6 . 02 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
2 . 1 . 6 . 02 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 6 . 02 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 6 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	

2 . 1 . 6 . 03 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	
2 . 1 . 6 . 03 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04 . 01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 6 . 05	Utang Pengadaan Aset Tetap	
2 . 1 . 6 . 05 . 01	Utang Pengadaan Aset Tetap	
2 . 1 . 6 . 06	Utang Pembiayaan	
2 . 1 . 6 . 06 . 01	Utang Pembiayaan	
2 . 1 . 7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	K
2 . 1 . 7 . 01	R/K PPKD	
2 . 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD	
2 . 1 . 9	Kewajiban-Penerimaan Dana Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan	K
2 . 1 . 9 . 01	Utang Dana Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan	
2 . 1 . 9 . 01 . 01	Utang Dana Reklamasi	
2 . 1 . 9 . 01 . 02	Utang Jaminan Kesungguhan	
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	K
2 . 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 2 . 1 . 01 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 2 . 1 . 02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 2 . 1 . 02 . 01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 2 . 1 . 03	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2 . 2 . 1 . 03 . 01	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2 . 2 . 1 . 04	Utang Pemerintah Pusat	
2 . 2 . 1 . 04 . 01	Utang Pemerintah Pusat	
2 . 2 . 1 . 05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 2 . 1 . 05 . 01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 2 . 1 . 06	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2 . 2 . 1 . 06 . 01	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2 . 2 . 2	Utang Jangka Panjang Lainnya	K
2 . 2 . 2 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2 . 2 . 2 . 01 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
3	EKUITAS	
3 . 1	EKUITAS	
3 . 1 . 1	Ekuitas	K
3 . 1 . 1 . 01	Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 01 . 01	Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 02	Koreksi Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Nilai Persediaan	
3 . 1 . 1 . 02 . 02	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
3 . 1 . 1 . 02 . 03	Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	
3 . 1 . 1 . 02 . 04	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	
3 . 1 . 1 . 02 . 05	Koreksi Ekuitas - Ekstrakomptable	
3 . 1 . 1 . 02 . 06	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	
3 . 1 . 1 . 02 . 07	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	
3 . 1 . 1 . 02 . 08	Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar SKPD	
3 . 1 . 1 . 02 . 09	Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	
3 . 1 . 1 . 02 . 10	Koreksi Ekuitas - Piutang	
3 . 1 . 1 . 02 . 11	Koreksi Ekuitas - Lain-lain	
3 . 1 . 1 . 02 . 12	Koreksi Ekuitas - Lain-lain Antar SKPD	
3 . 1 . 2	Surplus/Defisit LO	K
3 . 1 . 2 . 01	Surplus/Defisit LO	
3 . 1 . 2 . 01 . 01	Surplus/Defisit LO	

4	PENDAPATAN - LRA	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	K
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 05	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 1 . 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 06	Dst	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 02	Motel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 04	Gubuk Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pesanggrahan - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LRA	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LRA	

4 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 11	Kolam Renang - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 12	Pajak Hiburan dan Rekreasi - LRA
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 02	Reklame Kain - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 03	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 04	Reklame Selebaran - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 05	Reklame Berjalan - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 06	Reklame Udara - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 07	Reklame Apung - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 08	Reklame Suara - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 09	Reklame Film/Slide - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 10	Reklame Peragaan - LRA
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA
4 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA
4 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LRA
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LRA
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu Setengah Permata - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LRA
4 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LRA

4 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 38	Batu Split - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 39	Batu Latrit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 40	Bata (Tanah Liat Bahan Bangunan) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 41	Batu Split - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 42	Batu Latrit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 43	Bata (Tanah Liat Bahan Bangunan) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 44	Debu Crusheran - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 45	Laterit Batu Gunung (Base Coarse) -LRA	
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	
4 . 1 . 1 . 17	Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 1 . 17 . 01	Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	K
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 2 . 04 . 01	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 2 . 04 . 02	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA	
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	

4 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4 . 1 . 2 . 07 . 12	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
4 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LRA
4 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LRA
4 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LRA
4 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
4 . 1 . 2 . 10	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4 . 1 . 2 . 10 . 01	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4 . 1 . 2 . 10 . 02	Pelatihan Teknis - LRA
4 . 1 . 2 . 11	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus - LRA
4 . 1 . 2 . 11 . 01	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus - LRA
4 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LRA
4 . 1 . 2 . 12 . 01	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LRA
4 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4 . 1 . 2 . 13 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
4 . 1 . 2 . 13 . 02	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan - LRA
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan - LRA
4 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Gorsir/Pertokoan - LRA
4 . 1 . 2 . 16 . 01	Retribusi Pasar Gorsir/Pertokoan - LRA
4 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4 . 1 . 2 . 17 . 01	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Retribusi Terminal - LRA
4 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
4 . 1 . 2 . 18 . 04	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA
4 . 1 . 2 . 21 . 03	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4 . 1 . 2 . 22 . 01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA

4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Jasa Usaha Perjalanan Wisata - LRA	
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Retribusi Jasa Usaha Perjalanan Wisata - LRA	
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga - LRA	
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Retribusi Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga - LRA	
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Salon Kecantikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Retribusi Salon Kecantikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Jasa Pengguna WC - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Retribusi Jasa Pengguna WC - LRA	
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan - LRA	
4 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 01	Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia - LRA	
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perizinan - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 03	Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 04	Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 05	Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 06	Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikasi dan Kesempurnaan - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 07	Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Koperasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 08	Retribusi Izin Pengambilan Hsl Hutan Ikutan, Hsl Kayu diluar Kawasan Hutan & Hasil Hutan Perkebunan	
4 . 1 . 2 . 32 . 09	Retribusi Izin Jasa Konstruksi - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 10	Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 11	Retribusi Perizinan Fasilitas Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 12	Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan - LRA	
4 . 1 . 2 . 33	Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 01	Retribusi Izin Alat Penebangan Kayu - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 02	Retribusi Izin Pemanfaatan Limbah dan Peredaran Kayu - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 03	Retribusi Izin Pengusahaan Pertambangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 04	Retribusi Izin Tempat Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 05	Retribusi Izin Industri Rumah Tangga/Toko Obat - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 06	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 07	Retribusi IMTA - LRA	
4 . 1 . 2 . 34	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 34 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	K
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Depo Obat - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Dana Pembangunan - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 05	PD Pasar Bauntung Batuah - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 06	PDAM - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 07	PD BIM - LRA	
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	

4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst	
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	K
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Bendahara - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA	

4 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi penyebrangan Air - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 33	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LRA
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA

4 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4 . 1 . 4 . 11 . 02	Pendapatan Denda Pelanggaran Perda Yustisi - LRA
4 . 1 . 4 . 11 . 03	Pendapatan Denda Sanksi Administrasi Kependudukan
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA
4 . 1 . 4 . 12 . 04	Dst
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Penggunaan Belanja Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 07	Pendapatan dari Pengembalian Taspen - LRA
4 . 1 . 4 . 13 . 08	Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan - LRA
4 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4 . 1 . 4 . 15 . 03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
4 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LRA
4 . 1 . 4 . 17 . 01	Pendapatan Zakat - LRA
4 . 1 . 4 . 17 . 02	Dst
4 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LRA
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4 . 1 . 4 . 19 . 24	Pendapatan bunga bank (JKN)
4 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LRA
4 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LRA
4 . 1 . 4 . 20 . 03	Jasa Angkutan Penyeberangan - LRA
4 . 1 . 4 . 20 . 04	Lumpsum Payment - LRA
4 . 1 . 4 . 20 . 05	Penerimaan Mobil Derek - LRA
4 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA
4 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA
4 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA
4 . 1 . 4 . 21 . 04	dst ...
4 . 1 . 4 . 21 . 05	dst ...
4 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dst

4 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 02	Puskesmas Karang Intan 1 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 03	Puskesmas Karang Intan 2 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 04	Puskesmas Sungai Pinang - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 05	Puskesmas Paramasan - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 06	Puskesmas Simpang Empat 1 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 07	Puskesmas Simpang Empat 2 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 08	Puskesmas Aluh-Aluh - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 09	Puskesmas Beruntung Baru - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 10	Puskesmas Kertak Hanyar - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 11	Puskesmas Tatah Makmur - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 12	Puskesmas Gambut - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 13	Puskesmas Sungai Tabuk 1 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 14	Puskesmas Sungai Tabuk 2 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 15	Puskesmas Sungai Tabuk 3 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 16	Puskesmas Martapura Barat - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 17	Puskesmas Martapura Timur - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 18	Puskesmas Martapura 1 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 19	Puskesmas Martapura 2 - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 20	Puskesmas Pengaron - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 21	Puskesmas Sambung Makmur - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 22	Puskesmas Astambul - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 23	Puskesmas Mataraman - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 24	Puskesmas Aranio - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 25	Pendapatan Bunga Bank (JKN) - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 26	Puskesmas Telaga Bauntung - LRA	
4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan Bunga Deposito - LRA	
4 . 1 . 4 . 24 . 01	Deposito pada Bank Muamalat - LRA	
4 . 1 . 4 . 24 . 02	Deposito pada Bank BNI - LRA	
4 . 1 . 4 . 24 . 03	Deposito pada Bank Mandiri - LRA	
4 . 1 . 4 . 26	Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 26 . 01	Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 27	Pendapatan Dana BOS - LRA	
4 . 1 . 4 . 27 . 01	Pendapatan Dana BOS - LRA	
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	K
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Pembangunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil SDA Kehutanan	

4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	
4 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LRA	
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 20	Dana Alokasi Khusus Reboisasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 21	DAK Non Fisik	
4 . 2 . 1 . 04 . 22	DAK Infrastruktur Publik Daerah - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 24	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 25	DAK Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 26	Tunjangan Profesi Guru - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 27	Tambahan Penghasilan Guru - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 28	Bantuan Operasional kesehatan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 29	Akreditasi Puskesmas - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 30	Akreditasi Rumah Sakit - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 31	Jaminan Persalinan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 32	Bantuan Operasional KB - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 33	Bantuan Operasional PAUD - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 34	Tunjangan Khusus Guru- LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 35	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 36	DAK Tambahan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 37	DAK Bidang Pariwisata - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 38	DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 39	DAK Penugasan Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	K
4 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA	
4 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Dana Desa	
4 . 2 . 2 . 04	Dana Desa - LRA	
4 . 2 . 2 . 04 . 01	Dana Desa - LRA	
4 . 2 . 2 . 05	Dana Insentif Daerah - LRA	
4 . 2 . 2 . 05 . 01	Dana Insentif Daerah - LRA	
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	K

4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst	
4 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst	
4 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	K
4 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst	
4 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst	
4 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst	
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	K
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Desa - LRA	
4 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 05 . 01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA	
4 . 3 . 1 . 05 . 02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA	
4 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 06	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4 . 3 . 1 . 06 . 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4 . 3 . 2	Dana Darurat - LRA	K
4 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LRA	
4 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA	
4 . 3 . 2 . 01 . 02	Dst	
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	K
4 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LRA	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	
4 . 3 . 3 . 01 . 02	Dst	
4 . 3 . 4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya - LRA	K
4 . 3 . 4 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LRA	

4 . 3 . 4 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	
4 . 3 . 4 . 01 . 08	Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	
4 . 3 . 4 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi lain - LRA	
4 . 3 . 4 . 03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten - LRA	
4 . 3 . 4 . 04	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota - LRA	
4 . 3 . 4 . 04 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota - LRA	
4 . 3 . 4 . 05	Dana Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 3 . 5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LRA	K
4 . 3 . 5 . 01	Dana Penyesuaian - LRA	
4 . 3 . 5 . 01 . 09	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	
5	BELANJA	
5 . 1	BELANJA OPERASI	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	D
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Belanja Uang Paket	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Belanja Tunjangan Komisi	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Belanja Tunjangan Perumahan	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	BPJS Kesehatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	BPJS Ketenagakerjaan	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Khusus Guru	
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	
5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tunjangan Komunikasi Intensif	
5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Reses	
5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tunjangan Transportasi	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
5 . 1 . 1 . 02 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
5 . 1 . 1 . 02 . 03	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
5 . 1 . 1 . 02 . 04	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
5 . 1 . 1 . 02 . 05	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Fungsional Umum (Staf)	
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	
5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diluar jam kerja	
5 . 1 . 1 . 02 . 09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)	

5 . 1 . 1 . 02 . 10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Pelaksana
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
5 . 1 . 1 . 04 . 05	Belanja Biaya Pemungutan PBB
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 02	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 03	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 04	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5 . 1 . 1 . 05 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 02	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 03	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 04	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA

5 . 1 . 1 . 06 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 25	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 26	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 28	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 29	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 30	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 32	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS	
5 . 1 . 1 . 08	Honorarium PNS	
5 . 1 . 1 . 08 . 05	Honorarium Bendahara/Pengurus Barang	
5 . 1 . 1 . 09	Honorarium Non PNS	
5 . 1 . 1 . 09 . 03	Uang Saku	
5 . 1 . 1 . 09 . 04	Petugas Khusus	
5 . 1 . 1 . 09 . 05	Upah	
5 . 1 . 1 . 10	Belanja Pegawai BLUD	
5 . 1 . 1 . 10 . 01	Belanja Pegawai BLUD RSUD	
5 . 1 . 1 . 10 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	
5 . 1 . 1 . 11	Tunjangan Daerah	
5 . 1 . 1 . 11 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
5 . 1 . 1 . 12	Tambahan Penghasilan Non PNS	
5 . 1 . 1 . 12 . 01	Tambahan Penghasilan Non PNS diluar jam Kerja	
5 . 1 . 1 . 13	Belanja Pegawai BOS	
5 . 1 . 1 . 13 . 01	Belanja Pegawai BOS	
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	D
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	

5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 1 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 1 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Logistik
5 . 1 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Kedokteran
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 . 1 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak
5 . 1 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan obat-obatan
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja bibit ikan
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan pemberian penghargaan/prestasi
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan
5 . 1 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan kelengkapan komputer
5 . 1 . 2 . 02 . 10	Belanja bahan obat-obatan (DAK)
5 . 1 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan obat-obatan (Pendamping DAK)
5 . 1 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (DAK)
5 . 1 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Pendamping DAK)
5 . 1 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (DAK)
5 . 1 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (Pendamping DAK)
5 . 1 . 2 . 02 . 16	REKENING TIDAK TERPAKAI (JANGAN DIKLIK)
5 . 1 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan kelengkapan penghias rumah tangga
5 . 1 . 2 . 02 . 18	Belanja bahan kelengkapan pameran
5 . 1 . 2 . 02 . 19	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik
5 . 1 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi
5 . 1 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 1 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5 . 1 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Kepanitiaan (Khusus Sekretariat Daerah)
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Penunjang kegiatan kantor (Khusus Sekretariat Daerah)
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Kesejahteraan Pegawai
5 . 1 . 2 . 03 . 15	Belanja Perencanaan/Pengawasan
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Penelitian
5 . 1 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi
5 . 1 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi
5 . 1 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa penyusunan paket regulasi/dokumentasi pembangunan
5 . 1 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pelayanan Medis
5 . 1 . 2 . 03 . 21	REKENING TIDAK TERPAKAI (JANGAN DIKLIK)
5 . 1 . 2 . 03 . 22	REKENING TIDAK TERPAKAI (JANGAN DIKLIK)
5 . 1 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Pengiriman Barang Milik Pemerintah Daerah
5 . 1 . 2 . 03 . 24	Belanja Tamu Pemerintah Daerah (Khusus Sekretariat Daerah)
5 . 1 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Kebersihan
5 . 1 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Narasumber
5 . 1 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5 . 1 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Uji Laboratorium
5 . 1 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi
5 . 1 . 2 . 03 . 30	Jasa Registrasi
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi

5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 . 1 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Petugas Khusus
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 1 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 . 1 . 2 . 05 . 09	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Dst.....
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 1 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 1 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst.....
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 1 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 1 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...
5 . 1 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat
5 . 1 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator
5 . 1 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Bulldoser
5 . 1 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lapangan
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Studio dan Komunikasi
5 . 1 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Peralatan Survey
5 . 1 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kerja Lapangan
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Acara Tertentu
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)
5 . 1 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Kelengkapannya
5 . 1 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Kelengkapannya (DAK)
5 . 1 . 2 . 12 . 09	Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Kelengkapannya (Pendamping DAK)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst.....

5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 1 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Pasien
5 . 1 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Upacara
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 1 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5 . 1 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5 . 1 . 2 . 16 . 01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5 . 1 . 2 . 16 . 02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5 . 1 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai
5 . 1 . 2 . 17 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
5 . 1 . 2 . 17 . 02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
5 . 1 . 2 . 17 . 03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan
5 . 1 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....
5 . 1 . 2 . 18 . 07	Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan
5 . 1 . 2 . 18 . 08	Belanja Pemeliharaan Sarana Perhubungan
5 . 1 . 2 . 18 . 09	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
5 . 1 . 2 . 18 . 10	Belanja Pemeliharaan Gedung (DAK)
5 . 1 . 2 . 18 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung (Pendamping DAK)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst.....
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....
5 . 1 . 2 . 20 . 04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pendamping DAK)
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5 . 1 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst.....
5 . 1 . 2 . 22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5 . 1 . 2 . 22 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5 . 1 . 2 . 22 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5 . 1 . 2 . 22 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5 . 1 . 2 . 22 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis
5 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst.....
5 . 1 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5 . 1 . 2 . 24 . 02	Belanja Moderator
5 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....

5 . 1 . 2 . 25	Belanja Kesejahteraan Pegawai	
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Kesejahteraan PNS	
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Kesejahteraan Non PNS	
5 . 1 . 2 . 25 . 03		
5 . 1 . 2 . 25 . 04		
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ratu Zalecha	
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas	
5 . 1 . 2 . 26 . 03	Belanja Barang dan Jasa BLUD Intan Hijau	
5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Barang Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
5 . 1 . 2 . 30 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
5 . 1 . 2 . 30 . 02	Belanja Administrasi Bank (JKN)	
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS	
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Tidak Tetap	
5 . 1 . 2 . 31 . 02	Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Honorer	
5 . 1 . 2 . 31 . 03	Jaminan Kesehatan bagi staf khusus dan pegawai lain	
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Pengawasan Tahunan	
5 . 1 . 2 . 32 . 01	Belanja Pengawasan Reguler	
5 . 1 . 2 . 32 . 02	Belanja pengawasan dengan tujuan	
5 . 1 . 2 . 33	Fasilitasi Penunjang Kegiatan	
5 . 1 . 2 . 33 . 01	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kelurahan	
5 . 1 . 2 . 34	Belanja Honorarium Non Pegawai	
5 . 1 . 2 . 34 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
5 . 1 . 2 . 34 . 02	Moderator	
5 . 1 . 2 . 35	Belanja Honorarium PNS	
5 . 1 . 2 . 35 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5 . 1 . 2 . 35 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5 . 1 . 2 . 35 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 35 . 04	Honorarium Petugas Khusus	
5 . 1 . 2 . 35 . 05	Honorarium Bendahara / Pengurus Barang	
5 . 1 . 2 . 36	Belanja Honorarium Non PNS	
5 . 1 . 2 . 36 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 36 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	
5 . 1 . 2 . 36 . 03	Uang Saku	
5 . 1 . 2 . 36 . 04	Honorarium Petugas Khusus	
5 . 1 . 2 . 36 . 05	Upah	
5 . 1 . 2 . 37	Belanja Barang dan Jasa PAUD Negeri	
5 . 1 . 2 . 37 . 01	Belanja Barang dan Jasa PAUD Negeri	
5 . 1 . 2 . 38	Belanja Barang Inventaris Kantor Masa Manfaat > 12 bulan	
5 . 1 . 2 . 38 . 01	Belanja Barang Inventaris Kantor dibawah Nilai Kapitalisasi Aset	
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	D
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman	
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5 . 1 . 3 . 01 . 02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	

5 . 1 . 3 . 01 . 05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD	
5 . 1 . 3 . 01 . 06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN	
5 . 1 . 3 . 01 . 07	Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 08	Dst.....	
5 . 1 . 3 . 02	Belanja Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 01	Belanja Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	D
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Subsidi	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5 . 1 . 4 . 01 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	
5 . 1 . 4 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	D
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 5 . 02 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
5 . 1 . 5 . 02 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
5 . 1 . 5 . 02 . 03	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
5 . 1 . 5 . 06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
5 . 1 . 5 . 06 . 01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....	
5 . 1 . 5 . 06 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 5 . 07	Belanja Hibah kepada BOP PAUD/SWASTA	
5 . 1 . 5 . 07 . 01	Belanja Hibah kepada BOP PAUD/SWASTA	
5 . 1 . 5 . 08	Belanja Hibah atau Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 5 . 08 . 01	Belanja Hibah atau Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	D
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
5 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	
5 . 1 . 6 . 04 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	
5 . 1 . 7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	D
5 . 1 . 7 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5 . 1 . 7 . 02 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5 . 1 . 8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	D

5 . 1 . 8 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	
5 . 1 . 8 . 04 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	
5 . 1 . 8 . 04 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Tertinggal (Alokasi Afirmasi) -LO	
5 . 2	BELANJA MODAL	
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	D
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan	
5 . 2 . 1 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang	
5 . 2 . 1 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
5 . 2 . 1 . 04 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar	
5 . 2 . 1 . 05 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis	
5 . 2 . 1 . 05 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
5 . 2 . 1 . 05 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak	
5 . 2 . 1 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa	
5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus	
5 . 2 . 1 . 08 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak	
5 . 2 . 1 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang	
5 . 2 . 1 . 09 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput	
5 . 2 . 1 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5 . 2 . 1 . 10 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalan	
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	
5 . 2 . 1 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
5 . 2 . 1 . 11 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	
5 . 2 . 1 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
5 . 2 . 1 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	
5 . 2 . 1 . 11 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan	
5 . 2 . 1 . 11 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	
5 . 2 . 1 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
5 . 2 . 1 . 11 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	

5 . 2 . 1 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5 . 2 . 1 . 12 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	
5 . 2 . 1 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	
5 . 2 . 1 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	
5 . 2 . 1 . 13 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
5 . 2 . 1 . 13 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
5 . 2 . 1 . 13 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	
5 . 2 . 1 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	
5 . 2 . 1 . 13 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	
5 . 2 . 1 . 13 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
5 . 2 . 1 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
5 . 2 . 1 . 13 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 1 . 13 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
5 . 2 . 1 . 13 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
5 . 2 . 1 . 14	Belanja Modal Tanah - BLUD	
5 . 2 . 1 . 14 . 01	Belanja Modal Tanah-BLUD	
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	D
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	

5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
5 . 2 . 2 . 09 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5 . 2 . 2 . 09 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5 . 2 . 2 . 09 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5 . 2 . 2 . 09 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
5 . 2 . 2 . 09 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi

5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 . 2 . 2 . 11 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5 . 2 . 2 . 11 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5 . 2 . 2 . 11 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5 . 2 . 2 . 13 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5 . 2 . 2 . 13 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 2 . 15 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5 . 2 . 2 . 19 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

5 . 2 . 2 . 19 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5 . 2 . 2 . 21 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5 . 2 . 2 . 21 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary

5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set
5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5 . 2 . 2 . 21 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5 . 2 . 2 . 21 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5 . 2 . 2 . 21 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5 . 2 . 2 . 21 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5 . 2 . 2 . 21 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5 . 2 . 2 . 21 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5 . 2 . 2 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5 . 2 . 2 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5 . 2 . 2 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi

5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5 . 2 . 2 . 23 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film
5 . 2 . 2 . 23 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5 . 2 . 2 . 23 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5 . 2 . 2 . 23 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5 . 2 . 2 . 23 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5 . 2 . 2 . 23 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5 . 2 . 2 . 23 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5 . 2 . 2 . 23 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5 . 2 . 2 . 23 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5 . 2 . 2 . 23 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5 . 2 . 2 . 23 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5 . 2 . 2 . 23 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5 . 2 . 2 . 23 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5 . 2 . 2 . 23 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5 . 2 . 2 . 23 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5 . 2 . 2 . 23 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5 . 2 . 2 . 23 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5 . 2 . 2 . 23 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5 . 2 . 2 . 23 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5 . 2 . 2 . 23 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5 . 2 . 2 . 23 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5 . 2 . 2 . 23 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5 . 2 . 2 . 23 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5 . 2 . 2 . 23 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5 . 2 . 2 . 23 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5 . 2 . 2 . 23 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 2 . 23 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5 . 2 . 2 . 23 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5 . 2 . 2 . 23 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5 . 2 . 2 . 23 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya
5 . 2 . 2 . 23 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
5 . 2 . 2 . 23 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5 . 2 . 2 . 23 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5 . 2 . 2 . 23 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan

5 . 2 . 2 . 23 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5 . 2 . 2 . 23 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5 . 2 . 2 . 23 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5 . 2 . 2 . 23 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5 . 2 . 2 . 23 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5 . 2 . 2 . 23 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5 . 2 . 2 . 23 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5 . 2 . 2 . 23 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5 . 2 . 2 . 23 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5 . 2 . 2 . 23 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5 . 2 . 2 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5 . 2 . 2 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5 . 2 . 2 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5 . 2 . 2 . 24 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5 . 2 . 2 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5 . 2 . 2 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5 . 2 . 2 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5 . 2 . 2 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5 . 2 . 2 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5 . 2 . 2 . 24 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument
5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5 . 2 . 2 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool
5 . 2 . 2 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5 . 2 . 2 . 25 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5 . 2 . 2 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scentific
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System

5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply
5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device
5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics
5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Experimental System
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 2 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment
5 . 2 . 2 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5 . 2 . 2 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5 . 2 . 2 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
5 . 2 . 2 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System
5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel
5 . 2 . 2 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes
5 . 2 . 2 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum
5 . 2 . 2 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5 . 2 . 2 . 30 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5 . 2 . 2 . 30 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5 . 2 . 2 . 30 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5 . 2 . 2 . 30 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5 . 2 . 2 . 30 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop

5 . 2 . 2 . 30 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemесinан : Electrical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB	
5 . 2 . 2 . 30 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang	
5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin	
5 . 2 . 2 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir	
5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja	
5 . 2 . 2 . 31 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)	
5 . 2 . 2 . 31 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
5 . 2 . 2 . 31 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal	
5 . 2 . 2 . 31 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri	
5 . 2 . 2 . 31 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	
5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum	
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar	
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	
5 . 2 . 2 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	
5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	
5 . 2 . 2 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	D
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	
5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
5 . 2 . 3 . 01 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	
5 . 2 . 3 . 01 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Observatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5 . 2 . 3 . 01 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5 . 2 . 3 . 01 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	

5 . 2 . 3 . 01 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5 . 2 . 3 . 01 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5 . 2 . 3 . 01 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5 . 2 . 3 . 01 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 01 . 20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5 . 2 . 3 . 01 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5 . 2 . 3 . 01 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5 . 2 . 3 . 01 . 23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
5 . 2 . 3 . 01 . 24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5 . 2 . 3 . 01 . 25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5 . 2 . 3 . 01 . 26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5 . 2 . 3 . 02 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama
5 . 2 . 3 . 02 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel
5 . 2 . 3 . 02 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel
5 . 2 . 3 . 02 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5 . 2 . 3 . 03 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat
5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah
5 . 2 . 3 . 04 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5 . 2 . 3 . 04 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan

5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi	
5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu	
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha	
5 . 2 . 3 . 06 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya	
5 . 2 . 3 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
5 . 2 . 3 . 07 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
5 . 2 . 3 . 10 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light	
5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells)	
5 . 2 . 3 . 10 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal	
5 . 2 . 3 . 10 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS	
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	D
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	
5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 01 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	
5 . 2 . 4 . 01 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol	
5 . 2 . 4 . 01 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta	
5 . 2 . 4 . 01 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	
5 . 2 . 4 . 02 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 02 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 02 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	
5 . 2 . 4 . 02 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	

5 . 2 . 4 . 02 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5 . 2 . 4 . 02 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5 . 2 . 4 . 02 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5 . 2 . 4 . 02 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5 . 2 . 4 . 03 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi
5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5 . 2 . 4 . 03 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5 . 2 . 4 . 03 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5 . 2 . 4 . 03 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5 . 2 . 4 . 03 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 04 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa
5 . 2 . 4 . 05 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5 . 2 . 4 . 05 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5 . 2 . 4 . 05 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5 . 2 . 4 . 05 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5 . 2 . 4 . 05 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5 . 2 . 4 . 05 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5 . 2 . 4 . 05 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA
5 . 2 . 4 . 06 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5 . 2 . 4 . 06 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5 . 2 . 4 . 06 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5 . 2 . 4 . 06 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5 . 2 . 4 . 06 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5 . 2 . 4 . 06 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

5 . 2 . 4 . 07 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 07 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 07 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 07 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 07 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 07 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5 . 2 . 4 . 08 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5 . 2 . 4 . 09 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5 . 2 . 4 . 11 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah
5 . 2 . 4 . 11 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
5 . 2 . 4 . 11 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 4 . 12 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5 . 2 . 4 . 12 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5 . 2 . 4 . 13 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 4 . 13 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

5 . 2 . 4 . 14 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5 . 2 . 4 . 15 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5 . 2 . 4 . 15 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5 . 2 . 4 . 15 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5 . 2 . 4 . 15 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5 . 2 . 4 . 15 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5 . 2 . 4 . 15 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5 . 2 . 4 . 15 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5 . 2 . 4 . 15 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5 . 2 . 4 . 15 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5 . 2 . 4 . 15 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5 . 2 . 4 . 16 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan
5 . 2 . 4 . 17 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5 . 2 . 4 . 18 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5 . 2 . 4 . 18 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5 . 2 . 4 . 19 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum
5 . 2 . 4 . 20 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5 . 2 . 4 . 20 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5 . 2 . 4 . 20 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5 . 2 . 4 . 20 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5 . 2 . 4 . 22 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

5 . 2 . 4 . 22 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	D
5 . 2 . 4 . 22 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air	
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
5 . 2 . 4 . 23 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	
5 . 2 . 4 . 23 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	
5 . 2 . 4 . 23 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM	
5 . 2 . 4 . 24	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLUD	
5 . 2 . 4 . 24 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLUD	
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	
5 . 2 . 5 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	
5 . 2 . 5 . 01 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	
5 . 2 . 5 . 01 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	
5 . 2 . 5 . 01 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	
5 . 2 . 5 . 01 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	
5 . 2 . 5 . 01 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
5 . 2 . 5 . 01 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
5 . 2 . 5 . 01 . 10	Belanja modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Elektronik	
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	
5 . 2 . 5 . 02 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	
5 . 2 . 5 . 03 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
5 . 2 . 5 . 03 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
5 . 2 . 5 . 03 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
5 . 2 . 5 . 03 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
5 . 2 . 5 . 03 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara	
5 . 2 . 5 . 03 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
5 . 2 . 5 . 03 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	
5 . 2 . 5 . 04 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	
5 . 2 . 5 . 04 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	

5 . 2 . 5 . 04 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	
5 . 2 . 5 . 04 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	
5 . 2 . 5 . 04 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	
5 . 2 . 5 . 04 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5 . 2 . 5 . 05 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	
5 . 2 . 5 . 05 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air	
5 . 2 . 5 . 05 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara	
5 . 2 . 5 . 05 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5 . 2 . 5 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	
5 . 2 . 5 . 06 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	
5 . 2 . 5 . 06 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas	
5 . 2 . 5 . 06 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata	
5 . 2 . 5 . 06 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	
5 . 2 . 5 . 06 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang	
5 . 2 . 5 . 06 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan	
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	
5 . 2 . 5 . 07 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	
5 . 2 . 5 . 07 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	
5 . 2 . 5 . 07 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan	
5 . 2 . 5 . 07 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	
5 . 2 . 5 . 07 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5 . 2 . 5 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5 . 2 . 5 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	
5 . 2 . 5 . 09 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	
5 . 2 . 5 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	
5 . 2 . 5 . 10 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	D
5 . 2 . 6 . 01	Belanja Modal Aset Lainnya	
5 . 2 . 6 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Lainnya - Perangkat Lunak	
5 . 2 . 6 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Lainnya - Lisensi	
5 . 2 . 6 . 01 . 03	Belanja Modal Aset Lainnya - Hak Cipta	
5 . 2 . 6 . 01 . 04	Belanja Modal Aset Lainnya - Kajian (DED)	
5 . 2 . 6 . 01 . 05	Belanja Modal Aset Lainnya - Warisan Budaya	
5 . 2 . 6 . 01 . 06	Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD	
5 . 2 . 6 . 01 . 07	Belanja Modal Aset Lainnya - BOS	
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	D
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01 . 02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	
5 . 3 . 1 . 01 . 03	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya	

6	TRANSFER	
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	D
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6 . 1 . 1 . 01 . 02	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
6 . 1 . 1 . 01 . 03	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D
6 . 2 . 1 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6 . 2 . 1 . 02	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6 . 2 . 1 . 02 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01 . 02	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tertinggal (Alokasi Afirmasi)	
6 . 2 . 2 . 02		
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D
6 . 2 . 3 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	
6 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2 . 4	Transfer Dana Otonomi Khusus	D
6 . 2 . 4 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
7	PEMBIAYAAN	
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	K
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 01 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SiLPA	
7 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02 . 02	Lain-lain	
7 . 1 . 1 . 03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
7 . 1 . 1 . 03 . 01	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
7 . 1 . 1 . 09	Sisa Belanja DAK	
7 . 1 . 1 . 09 . 04	Dst.....	
7 . 1 . 1 . 10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	
7 . 1 . 1 . 10 . 06	Dst.....	
7 . 1 . 1 . 11	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	
7 . 1 . 1 . 11 . 06	Dst.....	
7 . 1 . 1 . 12	Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus	
7 . 1 . 1 . 12 . 04	Dst.....	
7 . 1 . 1 . 13	Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur	
7 . 1 . 1 . 13 . 03	Dst.....	

7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	K
7.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
7.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan	
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	K
7.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
7.1.3.01.01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN	
7.1.3.01.02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD	
7.1.3.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta	
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	K
7.1.4.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7.1.4.01.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7.1.4.02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7.1.4.02.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7.1.4.03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7.1.4.03.01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7.1.4.04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7.1.4.04.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7.1.4.05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7.1.4.05.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7.1.4.06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7.1.4.06.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	K
7.1.5.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7.1.5.02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7.1.5.02.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7.1.5.03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7.1.5.03.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7.1.5.04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7.1.5.04.01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7.1.5.05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7.1.5.05.01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	K
7.1.6.01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7.1.6.01.01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7.1.6.02	Penarikan Dana Bergulir	
7.1.6.02.01	Penarikan Dana Bergulir	
7.1.6.03	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7.1.6.03.01	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7.1.6.04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7.1.6.04.01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7.1.7	Pinjaman Luar Negeri	K
7.1.7.01	Pinjaman Luar Negeri	
7.1.7.01.01	Pinjaman Luar Negeri	
7.1.8	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	K
7.1.8.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.1.8.01.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	D

7 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	
7 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	D
7 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal pada BUMN	
7 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyertaan Modal pada BUMN	
7 . 2 . 2 . 02	Penyertaan Modal pada BUMD	
7 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BUMD	
7 . 2 . 2 . 03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7 . 2 . 2 . 03 . 01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	D
7 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7 . 2 . 3 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7 . 2 . 3 . 02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 2 . 3 . 02 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 2 . 3 . 03	Pelunasan Obligasi Daerah	
7 . 2 . 3 . 03 . 01	Pelunasan Obligasi Daerah	
7 . 2 . 3 . 04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 3 . 04 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 3 . 05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 2 . 3 . 05 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 2 . 3 . 06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 2 . 3 . 06 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	D
7 . 2 . 4 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7 . 2 . 4 . 01 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7 . 2 . 4 . 02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7 . 2 . 4 . 02 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 4 . 03 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 4 . 04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 2 . 4 . 04 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 2 . 5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	D
7 . 2 . 5 . 01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 2 . 5 . 01 . 01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 2 . 5 . 02	Pembentukan Dana Bergulir	
7 . 2 . 5 . 02 . 01	Pembentukan Dana Bergulir	
7 . 2 . 5 . 03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7 . 2 . 5 . 03 . 01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7 . 2 . 5 . 04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 2 . 5 . 04 . 01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 2 . 6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	D
7 . 2 . 6 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7 . 2 . 6 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7 . 2 . 7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	D
7 . 2 . 7 . 01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7 . 2 . 7 . 01 . 01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7 . 3	SALDO ANGGARAN LEBIH	
7 . 3 . 1	Surplus/Defisit LRA	K

7.3.1.01	Surplus/Defisit LRA	
7.3.1.01.01	Surplus/Defisit LRA	
7.3.2	Pembiayaan Netto	K
7.3.2.01	Pembiayaan Netto	
7.3.2.01.01	Pembiayaan Netto	
7.3.3	SilPA/SiKPA	K
7.3.3.01	SILPA/SIKPA	
7.3.3.01.01	SILPA/SIKPA	
7.3.4	Perubahan SAL	K
7.3.4.01	Perubahan SAL	
7.3.4.01.01	Perubahan SAL	
8	PENDAPATAN - LO	
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	K
8.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	
8.1.1.01.01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8.1.1.01.02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8.1.1.01.03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8.1.1.01.04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8.1.1.01.05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8.1.1.01.06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8.1.1.01.07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8.1.1.01.08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8.1.1.01.10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8.1.1.01.11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	
8.1.1.02.01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8.1.1.02.02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8.1.1.02.03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8.1.1.02.04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO	
8.1.1.02.05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO	
8.1.1.02.06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8.1.1.02.07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8.1.1.02.08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8.1.1.02.09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8.1.1.02.10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8.1.1.02.11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8.1.1.03.01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO	
8.1.1.03.02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO	
8.1.1.03.03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO	
8.1.1.03.04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO	
8.1.1.03.05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO	
8.1.1.03.06	Dst	
8.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LO	
8.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan - LO	
8.1.1.05	Pajak Rokok - LO	
8.1.1.05.01	Pajak Rokok - LO	
8.1.1.06	Pajak Hotel - LO	
8.1.1.06.01	Hotel - LO	
8.1.1.06.02	Motel - LO	
8.1.1.06.03	Losmen - LO	
8.1.1.06.04	Gubuk Pariwisata - LO	
8.1.1.06.05	Wisma Pariwisata - LO	
8.1.1.06.06	Pesanggrahan - LO	
8.1.1.06.07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO	
8.1.1.06.08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO	

8 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LO
8 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LO
8 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 11	Kolam Renang - LO
8 . 1 . 1 . 08 . 12	Pajak Hiburan dan Rekreasi - LO
8 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 02	Pajak Reklame Kain - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 04	Pajak Reklame Selebaran - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 05	Pajak Reklame Berjalan - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 06	Pajak Reklame Udara - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 07	Pajak Reklame Apung - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 08	Pajak Reklame Suara - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 09	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8 . 1 . 1 . 09 . 10	Pajak Reklame Peragaan - LO
8 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LO
8 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO
8 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO
8 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LO
8 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LO
8 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LO
8 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LO
8 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu setengah permata - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LO
8 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LO

8 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 38	Batu Split - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 39	Batu Latrit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 40	Bata (Tanah Liat Bahan Bangunan) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 41	Batu Split - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 42	Batu Latrit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 43	Bata (Tanah Liat Bahan Bangunan) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 44	Debu Crusheran - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 45	Laterit Batu Gunung (Base Coarse) - LO	
8 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	
8 . 1 . 1 . 17	Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 1 . 17 . 01	Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	K
8 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO	
8 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	

8 . 1 . 2 . 04 . 01	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8 . 1 . 2 . 04 . 02	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO
8 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO
8 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO
8 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8 . 1 . 2 . 07 . 12	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LO
8 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8 . 1 . 2 . 10	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 . 1 . 2 . 10 . 01	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 2 . 11 . 01	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 2 . 11 . 02	
8 . 1 . 2 . 11 . 03	
8 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LO
8 . 1 . 2 . 12 . 01	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LO
8 . 1 . 2 . 12 . 02	
8 . 1 . 2 . 12 . 03	
8 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 2 . 13 . 01	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 2 . 13 . 02	
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 . 1 . 2 . 14 . 01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 . 1 . 2 . 14 . 02	
8 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan - LO
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan - LO
8 . 1 . 2 . 15 . 02	
8 . 1 . 2 . 15 . 03	
8 . 1 . 2 . 15 . 04	
8 . 1 . 2 . 15 . 05	
8 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Gorsir/Pertokoan - LO
8 . 1 . 2 . 16 . 01	Retribusi Pasar Gorsir/Pertokoan - LO
8 . 1 . 2 . 16 . 02	
8 . 1 . 2 . 16 . 03	

8 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 01	Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 2 . 17 . 02	
8 . 1 . 2 . 17 . 03	
8 . 1 . 2 . 17 . 04	
8 . 1 . 2 . 17 . 05	
8 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8 . 1 . 2 . 18 . 04	Retribusi Terminal - LO
8 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 . 1 . 2 . 21 . 01	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO
8 . 1 . 2 . 21 . 03	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO
8 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 . 1 . 2 . 22 . 01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LO
8 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LO
8 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 25 . 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 2 . 26	Retribusi Jasa Usaha Perjalanan Wisata - LO
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Retribusi Jasa Usaha Perjalanan Wisata - LO
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga - LO
8 . 1 . 2 . 27 . 01	Retribusi Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga - LO
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Salon Kecantikan - LO
8 . 1 . 2 . 28 . 01	Retribusi Salon Kecantikan - LO
8 . 1 . 2 . 28 . 02	
8 . 1 . 2 . 28 . 03	
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Jasa Pengguna WC - LO
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Retribusi Jasa Pengguna WC - LO
8 . 1 . 2 . 29 . 02	
8 . 1 . 2 . 29 . 03	
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan - LO
8 . 1 . 2 . 30 . 01	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan - LO
8 . 1 . 2 . 30 . 02	
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 01	Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia - LO
8 . 1 . 2 . 31 . 02	
8 . 1 . 2 . 31 . 03	
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perizinan - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 03	Retribusi Izin Gangguan - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 04	Retribusi Izin Trayek - LO
8 . 1 . 2 . 32 . 05	Retribusi Izin Perikanan - LO

8 . 1 . 2 . 32 . 06	Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikasi dan Kesempurnaan - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 07	Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Koperasi - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 08	Retribusi Izin Pengambilan Hsl Hutan Ikutan, Hsl Kayu diluar Kawasan Hutan & Hasil Hutan Perkebunan	
8 . 1 . 2 . 32 . 09	Retribusi Izin Jasa Konstruksi - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 10	Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 11	Retribusi Perizinan Fasilitas Kesehatan - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 12	Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan - LO	
8 . 1 . 2 . 33	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 01	Retribusi Izin Alat Penebangan Kayu - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 02	Retribusi Izin Pemanfaatan Limbah dan Peredaran Kayu - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 03	Retribusi Izin Pengusahaan Pertambangan - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 04	Retribusi Izin Tempat Usaha - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 05	Retribusi Izin Industri Rumah Tangga/Toko Obat - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 06	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 07	Retribusi IMTA - LO	
8 . 1 . 2 . 34	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 34 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	K
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Depo Obat - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 04	Dana Pembangunan - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 05	PD Pasar Bauntung Batuah - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 06	PDAM - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 07	PD BIM - LO	
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst	
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	K
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst	
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 03	dst...	
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	

8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8 . 1 . 4 . 06 . 04	Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
8 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO

8 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8 . 1 . 4 . 09 . 33	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8 . 1 . 4 . 11 . 02	Pendapatan Denda Pelanggaran Perda Yustisi - LO
8 . 1 . 4 . 11 . 03	Pendapatan Denda Sanksi Administrasi Kependudukan
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8 . 1 . 4 . 12 . 03	Dst
8 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian -LO
8 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Penggunaan Belanja Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 07	Pendapatan dari Pengembalian Taspen - LO
8 . 1 . 4 . 13 . 08	Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan - LO
8 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst

8 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8 . 1 . 4 . 15 . 03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LO
8 . 1 . 4 . 17 . 01	Pendapatan Zakat - LO
8 . 1 . 4 . 17 . 02	Dst
8 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 03	Jasa Angkutan Penyeberangan - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 04	Lumpsum Payment - LO
8 . 1 . 4 . 20 . 05	Penerimaan Mobil Derek - LO
8 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8 . 1 . 4 . 21 . 04	Dst
8 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
8 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO
8 . 1 . 4 . 22 . 02	Dst
8 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 02	Puskesmas Karang Intan 1 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 03	Puskesmas Karang Intan 2 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 04	Puskesmas Sungai Pinang - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 05	Puskesmas Paramasan - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 06	Puskesmas Simpang Empat 1 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 07	Puskesmas Simpang Empat 2 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 08	Puskesmas Aluh-Aluh - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 09	Puskesmas Beruntung Baru - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 10	Puskesmas Kertak Hanyar - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 11	Puskesmas Tatah Makmur - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 12	Puskesmas Gambut - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 13	Puskesmas Sungai Tabuk 1 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 14	Puskesmas Sungai Tabuk 2 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 15	Puskesmas Sungai Tabuk 3 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 16	Puskesmas Martapura Barat - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 17	Puskesmas Martapura Timur - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 18	Puskesmas Martapura 1 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 19	Puskesmas Martapura 2 - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 20	Puskesmas Pengaron - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 21	Puskesmas Sambung Makmur - LO
8 . 1 . 4 . 23 . 22	Puskesmas Astambul - LO

8 . 1 . 4 . 23 . 23	Puskesmas Mataraman - LO	
8 . 1 . 4 . 23 . 24	Puskesmas Aranio - LO	
8 . 1 . 4 . 23 . 25	Pendapatan Bunga Bank (JKN) - LO	
8 . 1 . 4 . 23 . 26	Puskesmas Telaga Bauntung - LO	
8 . 1 . 4 . 24	Penerimaan Bunga Deposito - LO	
8 . 1 . 4 . 24 . 01	Deposito pada Bank Muamalat - LO	
8 . 1 . 4 . 24 . 02	Deposito pada Bank BNI - LO	
8 . 1 . 4 . 24 . 03	Deposito pada Bank Mandiri - LO	
8 . 1 . 4 . 25	Kerjasama Investasi Pembangunan	
8 . 1 . 4 . 25 . 01	Kerjasama Investasi Pembangunan	
8 . 1 . 4 . 26	Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 26 . 01	Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 27	Pendapatan Dana BOS - LO	
8 . 1 . 4 . 27 . 01	Pendapatan Dana BOS - LO	
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	K
8 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Pembangunan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil SDA Kehutanan	
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
8 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LO	
8 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO	

8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 20	Dana Alokasi Khusus Reboisasi - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 21	DAK Non Fisik - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 22	DAK Infrastruktur Publik Daerah - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 24	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 25	DAK Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)- LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 26	Tunjangan Profesi Guru - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 27	Tambahan Penghasilan Guru - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 28	Bantuan Operasional kesehatan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 29	Akreditasi Puskesmas - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 30	Akreditasi Rumah Sakit - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 31	Jaminan Persalinan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 32	Bantuan Operasional KB - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 33	Bantuan Operasional PAUD - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 34	Tunjangan Khusus Guru- LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 35	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 36	DAK Tambahan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 37	DAK Bidang Pariwisata - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 38	DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 39	DAK Penugasan Bidang Kesehatan - LO	
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	K
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO	
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO	
8 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LO	
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 06	Pendapatan Dana Desa - LO	
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	K
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst	
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst	
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	K
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	
8 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	
8 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst	
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst	
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	
8 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	
8 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst	

8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	K
8.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8.3.1.01.02	Dst	
8.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8.3.1.02.02	Dst	
8.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8.3.1.03.02	Dst	
8.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	
8.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	
8.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	
8.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO	
8.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO	
8.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO	
8.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO	
8.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	
8.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	
8.3.2	Dana Darurat - LO	K
8.3.2.01	Dana Darurat - LO	
8.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO	
8.3.2.01.02	Dst	
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	K
8.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LO	
8.3.3.01.01	Pendapatan Lainnya - LO	
8.3.3.01.02	Dst	
8.3.3.01.24	Pendapatan bunga bank (JKN)	
8.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya - LO	K
8.3.4.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - LO	
8.3.4.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
8.3.4.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LO	
8.3.4.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
8.3.4.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO	
8.3.4.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8.3.4.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO	
8.3.4.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	
8.3.4.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	
8.3.4.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi lain - LO	
8.3.4.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten - LO	
8.3.4.04	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota - LO	
8.3.4.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota - LO	
8.3.4.05	Dana Bagi hasil Lainnya - LO	
8.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	K
8.3.5.01	Dana Penyesuaian - LO	
8.3.5.01.09	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	
8.3.5.02	Dana Otonomi Khusus - LO	
8.3.5.03	Dana Keistimewaan - LO	
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	K

8 . 4 . 1 . 01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 07	Dst	
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	K
8 . 4 . 2 . 01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 08	Dst	
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	K
8 . 4 . 3 . 01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8 . 4 . 3 . 01 . 01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8 . 4 . 3 . 01 . 02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	K
8 . 5 . 1 . 01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
8 . 5 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
9	BEBAN	
9 . 1	BEBAN OPERASI	
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	D
9 . 1 . 1 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 04	Beban Tunjangan Fungsional - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 06	Beban Tunjangan Beras - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 08	Beban Pembulatan Gaji - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 10	Beban Uang Paket - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 12	Beban Tunjangan Komisi - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 16	Beban Tunjangan Perumahan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 21	Beban BPJS Kesehatan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 22	Beban BPJS Ketenagakerjaan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 23	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	
9 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Khusus Guru - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 27	Beban Tunjangan Badan Pembentukan Perda - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 29	Beban Tunjangan Reses - LO	

9 . 1 . 1 . 01 . 30	Beban Tunjangan Transportasi - LO
9 . 1 . 1 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 05	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 06	Beban Tambahan Penghasilan Fungsional Umum (staf) - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 07	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diluar jam kerja - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 08	Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu) - LO
9 . 1 . 1 . 02 . 10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Pelaksana - LO
9 . 1 . 1 . 03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9 . 1 . 1 . 03 . 01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9 . 1 . 1 . 03 . 02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9 . 1 . 1 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO
9 . 1 . 1 . 04 . 05	Beban Pemungutan PBB - LO
9 . 1 . 1 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 01	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 02	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 03	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 04	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 06	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 07	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 08	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 09	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9 . 1 . 1 . 05 . 17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 01	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 02	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 03	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 04	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

9 . 1 . 1 . 06 . 05	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 07	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 08	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 09	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
9 . 1 . 1 . 06 . 24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9 . 1 . 1 . 06 . 32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
9 . 1 . 1 . 07	Beban Uang Lembur - LO
9 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Uang Lembur PNS - LO
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Beban Uang Lembur Non PNS - LO
9 . 1 . 1 . 08	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
9 . 1 . 1 . 08 . 01	Beban Tunjangan Profei Guru PNSD
9 . 1 . 1 . 09	Beban Tambahan Penghasilan Non PNS diluar jam Kerja - LO
9 . 1 . 1 . 09 . 01	Beban Tambahan Penghasilan Non PNS diluar jam Kerja - LO
9 . 1 . 1 . 10	Beban Honorarium PNS - LO
9 . 1 . 1 . 10 . 01	Honorarium Bendahara / Pengurus Barang - LO
9 . 1 . 1 . 10 . 02	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
9 . 1 . 1 . 10 . 03	Beban Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa-LO
9 . 1 . 1 . 10 . 04	Beban Honorarium Petugas Khusus - LO

9 . 1 . 1 . 11	Beban Honorarium Non PNS - LO	
9 . 1 . 1 . 11 . 01	Uang Saku - LO	
9 . 1 . 1 . 11 . 02	Petugas Khusus - LO	
9 . 1 . 1 . 11 . 03	Upah - LO	
9 . 1 . 1 . 12	Beban Pegawai BLUD - LO	
9 . 1 . 1 . 12 . 01	Beban Pegawai BLUD Gudang Obat - LO	
9 . 1 . 1 . 12 . 02	Beban Pegawai BLUD Puskesmas - LO	
9 . 1 . 1 . 12 . 03	Beban Pegawai BLUD RSUD - LO	
9 . 1 . 1 . 12 . 04	Beban Pegawai BLUD Gudang Obat - LO	
9 . 1 . 1 . 13	Beban Pegawai BOS	
9 . 1 . 1 . 13 . 01	Beban Pegawai BOS	
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	D
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis	
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Beban Bahan Logistik	
9 . 1 . 2 . 01 . 10	Beban Peralatan Kedokteran	
9 . 1 . 2 . 01 . 11	Beban Persediaan Bahan Sandang	
9 . 1 . 2 . 01 . 12	Beban Persediaan Bahan Alat Dapur	
9 . 1 . 2 . 02	Beban Persediaan Bahan/ Material	
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak	
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk	
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Makanan Pokok	
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Persediaan Bibit Ikan	
9 . 1 . 2 . 02 . 08	Beban Persediaan Bahan Percontohan	
9 . 1 . 2 . 02 . 09	Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Komputer	
9 . 1 . 2 . 02 . 10	Beban Bahan Obat-obatan (DAK)	
9 . 1 . 2 . 02 . 11	Beban Bahan Obat-obatan (Pendamping DAK)	
9 . 1 . 2 . 02 . 12	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman (DAK)	
9 . 1 . 2 . 02 . 13	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman (Pendamping DAK)	
9 . 1 . 2 . 02 . 14	Beban Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk (DAK)	
9 . 1 . 2 . 02 . 15	Beban Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk (Pendamping DAK)	
9 . 1 . 2 . 02 . 16	Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Penghias Rumah Tangga	
9 . 1 . 2 . 02 . 17	Beban Bahan Kelengkapan Pameran	
9 . 1 . 2 . 02 . 19	Beban Persediaan Makanan Pokok	
9 . 1 . 2 . 02 . 20	Beban Bahan Laboratorium	
9 . 1 . 2 . 02 . 23	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
9 . 1 . 2 . 03	Beban Jasa Kantor	
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon	
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air	
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman	
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan	
9 . 1 . 2 . 03 . 10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	

9 . 1 . 2 . 03 . 12	Beban Perencanaan/Pengawasan
9 . 1 . 2 . 03 . 13	Beban Penelitian
9 . 1 . 2 . 03 . 14	Beban Dekorasi
9 . 1 . 2 . 03 . 15	Beban Dokumentasi
9 . 1 . 2 . 03 . 16	Beban Jasa Penyusunan Paket Regulasi/Dokumentasi Pembangunan
9 . 1 . 2 . 03 . 17	Beban Jasa Pelayanan Medis
9 . 1 . 2 . 03 . 18	Beban Jasa Pengiriman Barang Milik Pemerintah Daerah
9 . 1 . 2 . 03 . 19	Beban Tamu Pemerintah Daerah (Khusus SETDA)
9 . 1 . 2 . 03 . 20	Beban Kebersihan
9 . 1 . 2 . 03 . 21	Beban Narasumber
9 . 1 . 2 . 03 . 22	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan
9 . 1 . 2 . 03 . 23	Beban Jasa Pelayan Kesehatan
9 . 1 . 2 . 03 . 24	Beban Jasa Uji Laboratorium
9 . 1 . 2 . 03 . 25	Beban Jasa Promosi dan Publikasi
9 . 1 . 2 . 03 . 26	Beban Registrasi
9 . 1 . 2 . 03 . 27	Beban Penunjang kegiatan kantor (Khusus Sekretariat Daerah)
9 . 1 . 2 . 03 . 28	Beban Kesejahteraan Pegawai
9 . 1 . 2 . 04	Beban Premi Asuransi
9 . 1 . 2 . 04 . 01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9 . 1 . 2 . 04 . 02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....
9 . 1 . 2 . 05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service
9 . 1 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang
9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9 . 1 . 2 . 05 . 04	Beban Jasa KIR
9 . 1 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 05 . 06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9 . 1 . 2 . 05 . 08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9 . 1 . 2 . 05 . 09	Beban Perawatan Kendaraan Alat Berat
9 . 1 . 2 . 06	Beban Cetak dan Penggandaan
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan
9 . 1 . 2 . 06 . 03	Dst
9 . 1 . 2 . 07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9 . 1 . 2 . 07 . 01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
9 . 1 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9 . 1 . 2 . 07 . 03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9 . 1 . 2 . 07 . 04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst
9 . 1 . 2 . 08	Beban Sewa Sarana Mobilitas
9 . 1 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9 . 1 . 2 . 08 . 02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9 . 1 . 2 . 08 . 03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...
9 . 1 . 2 . 09	Beban Sewa Alat Berat
9 . 1 . 2 . 09 . 01	Beban Sewa Eskavator
9 . 1 . 2 . 09 . 02	Beban Sewa Buldoser
9 . 1 . 2 . 09 . 03	Beban Sewa Alat Berat Lapangan
9 . 1 . 2 . 10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9 . 1 . 2 . 10 . 01	Beban Sewa Meja Kursi
9 . 1 . 2 . 10 . 02	Beban Sewa Komputer dan Printer
9 . 1 . 2 . 10 . 03	Beban Sewa Proyektor
9 . 1 . 2 . 10 . 04	Beban Sewa Generator
9 . 1 . 2 . 10 . 05	Beban Sewa Tenda
9 . 1 . 2 . 10 . 06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9 . 1 . 2 . 10 . 07	Beban Sewa Peralatan Studio dan Komunikasi
9 . 1 . 2 . 10 . 08	Beban Sewa Peralatan Survey
9 . 1 . 2 . 10 . 09	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kerja Lapangan

9 . 1 . 2 . 11	Beban Makanan dan Minuman
9 . 1 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat
9 . 1 . 2 . 11 . 03	Beban Makanan dan Minuman Tamu
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
9 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Acara Tertentu
9 . 1 . 2 . 12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9 . 1 . 2 . 12 . 01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9 . 1 . 2 . 12 . 02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9 . 1 . 2 . 12 . 03	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)
9 . 1 . 2 . 12 . 04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9 . 1 . 2 . 12 . 05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9 . 1 . 2 . 12 . 06	Beban Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)
9 . 1 . 2 . 12 . 07	Beban Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Kelengkapannya
9 . 1 . 2 . 12 . 08	Beban Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Kelengkapannya (DAK)
9 . 1 . 2 . 12 . 09	Beban Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Kelengkapannya (Pendamping DAK)
9 . 1 . 2 . 13	Beban Pakaian Kerja
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan
9 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst ...
9 . 1 . 2 . 14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9 . 1 . 2 . 14 . 01	Beban Pakaian KORPRI
9 . 1 . 2 . 14 . 02	Beban Pakaian Adat Daerah
9 . 1 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional
9 . 1 . 2 . 14 . 04	Beban Pakaian Olahraga
9 . 1 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Pasien
9 . 1 . 2 . 14 . 06	Beban Belanja Pakaian Khusus Upacara
9 . 1 . 2 . 15	Beban Perjalanan Dinas
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
9 . 1 . 2 . 15 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
9 . 1 . 2 . 16	Beban Perjalanan Pindah Tugas
9 . 1 . 2 . 16 . 01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
9 . 1 . 2 . 16 . 02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
9 . 1 . 2 . 17	Beban Pemulangan Pegawai
9 . 1 . 2 . 17 . 01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
9 . 1 . 2 . 17 . 02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
9 . 1 . 2 . 17 . 03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
9 . 1 . 2 . 18	Beban Pemeliharaan
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharaan Tanah
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9 . 1 . 2 . 18 . 04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....
9 . 1 . 2 . 18 . 07	Beban Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan
9 . 1 . 2 . 18 . 08	Beban Belanja Pemeliharaan Sarana Perhubungan
9 . 1 . 2 . 18 . 09	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
9 . 1 . 2 . 18 . 10	Beban Belanja Pemeliharaan Gedung (DAK)
9 . 1 . 2 . 18 . 11	Beban Belanja Pemeliharaan Gedung (Pendamping DAK)
9 . 1 . 2 . 19	Beban Jasa Konsultasi
9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst ...
9 . 1 . 2 . 20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....

9 . 1 . 2 . 20 . 04	Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat (Pendamping DAK)
9 . 1 . 2 . 21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 21 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9 . 1 . 2 . 21 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst ...
9 . 1 . 2 . 22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9 . 1 . 2 . 22 . 01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
9 . 1 . 2 . 22 . 04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
9 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst
9 . 1 . 2 . 23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis
9 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst
9 . 1 . 2 . 24	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat - LO
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga - LO
9 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....
9 . 1 . 2 . 25	Beban Kesejahteraan Pegawai
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Kesejahteraan PNS - LO
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Kesejahteraan Non PNS - LO
9 . 1 . 2 . 25 . 03	
9 . 1 . 2 . 25 . 04	
9 . 1 . 2 . 26	Beban Barang dan Jasa BLUD
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Ratu Zalecha - LO
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Barang dan Jasa Puskesmas - LO
9 . 1 . 2 . 26 . 03	Beban Barang dan Jasa BLUD Intan Hijau - LO
9 . 1 . 2 . 27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9 . 1 . 2 . 28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9 . 1 . 2 . 28 . 01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9 . 1 . 2 . 29	Beban Barang dan Jasa Dana BOS
9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS
9 . 1 . 2 . 30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9 . 1 . 2 . 30 . 01	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9 . 1 . 2 . 30 . 02	Beban Administrasi Bank
9 . 1 . 2 . 31	Beban Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS
9 . 1 . 2 . 31 . 01	Beban Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Tidak Tetap
9 . 1 . 2 . 31 . 02	Beban Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Honorer
9 . 1 . 2 . 31 . 03	Beban Jaminan Kesehatan bagi staf khusus dan pegawai lain
9 . 1 . 2 . 32	Beban Pengawasan Tahunan
9 . 1 . 2 . 32 . 01	Beban Pengawasan Reguler
9 . 1 . 2 . 32 . 02	Beban pengawasan dengan tujuan
9 . 1 . 2 . 33	Beban Fasilitas Penunjang Kegiatan
9 . 1 . 2 . 33 . 01	Fasilitas Penunjang Kegiatan Kelurahan
9 . 1 . 2 . 34	Beban Honorarium Non Pegawai
9 . 1 . 2 . 34 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9 . 1 . 2 . 34 . 02	Beban Moderator
9 . 1 . 2 . 35	Beban Honorarium PNS
9 . 1 . 2 . 35 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9 . 1 . 2 . 35 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9 . 1 . 2 . 35 . 03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9 . 1 . 2 . 35 . 04	Beban Honorarium Petugas Khusus
9 . 1 . 2 . 35 . 05	Beban Honorarium Bendahara / Pengurus Barang

9 . 1 . 2 . 36	Beban Honorarium Non PNS	
9 . 1 . 2 . 36 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
9 . 1 . 2 . 36 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorir / Tidak Tetap	
9 . 1 . 2 . 36 . 03	Beban Uang Saku	
9 . 1 . 2 . 36 . 04	Beban Honorarium Petugas Khusus	
9 . 1 . 2 . 36 . 05	Beban Upah	
9 . 1 . 2 . 37	Beban Barang dan Jasa PAUD Negeri	
9 . 1 . 2 . 37 . 01	Beban Barang dan Jasa PAUD Negeri	
9 . 1 . 2 . 38	Beban Barang Inventaris Kantor Masa Manfaat > 12 bulan	
9 . 1 . 2 . 38 . 01	Belanja Barang Inventaris Kantor dibawah Nilai Kapitalisasi Aset	
9 . 1 . 3	Beban Bunga	D
9 . 1 . 3 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman	
9 . 1 . 3 . 01 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
9 . 1 . 3 . 01 . 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 06	Dst	
9 . 1 . 3 . 02	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 01	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	D
9 . 1 . 4 . 01	Beban Subsidi	
9 . 1 . 4 . 01 . 01	Beban Subsidi kepada BUMN	
9 . 1 . 4 . 01 . 02	Beban Subsidi kepada BUMD	
9 . 1 . 4 . 01 . 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
9 . 1 . 4 . 01 . 04	Dst	
9 . 1 . 5	Beban Hibah	D
9 . 1 . 5 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 01 . 01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 5 . 02 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
9 . 1 . 5 . 02 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
9 . 1 . 5 . 02 . 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	
9 . 1 . 5 . 03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
9 . 1 . 5 . 04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
9 . 1 . 5 . 06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
9 . 1 . 5 . 06 . 01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....	
9 . 1 . 5 . 06 . 05	Dst ...	
9 . 1 . 5 . 07	Belanja Hibah kepada BOP PAUD/SWASTA	
9 . 1 . 5 . 07 . 01	Belanja Hibah kepada BOP PAUD/SWASTA	
9 . 1 . 5 . 08	Beban Hibah atau Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 5 . 08 . 01	Beban Hibah atau Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	D
9 . 1 . 6 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
9 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...	
9 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst	

9 . 1 . 6 . 02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst	
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D
9 . 1 . 7 . 01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
9 . 1 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur	
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	
9 . 1 . 7 . 01 . 13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer	
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	
9 . 1 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	
9 . 1 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	
9 . 1 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	
9 . 1 . 7 . 01 . 22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	
9 . 1 . 7 . 01 . 23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
9 . 1 . 7 . 01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
9 . 1 . 7 . 01 . 25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
9 . 1 . 7 . 01 . 26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
9 . 1 . 7 . 01 . 27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
9 . 1 . 7 . 01 . 28	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
9 . 1 . 7 . 01 . 29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
9 . 1 . 7 . 01 . 30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
9 . 1 . 7 . 01 . 31	Beban Penyusutan Senjata Api	
9 . 1 . 7 . 01 . 32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
9 . 1 . 7 . 01 . 33	Beban Penyusutan Amunisi	
9 . 1 . 7 . 01 . 34	Beban Penyusutan Senjata Sinar	
9 . 1 . 7 . 01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
9 . 1 . 7 . 02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
9 . 1 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
9 . 1 . 7 . 02 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
9 . 1 . 7 . 02 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	
9 . 1 . 7 . 02 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	
9 . 1 . 7 . 02 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
9 . 1 . 7 . 02 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Candi	
9 . 1 . 7 . 02 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
9 . 1 . 7 . 02 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
9 . 1 . 7 . 02 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
9 . 1 . 7 . 02 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
9 . 1 . 7 . 03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	
9 . 1 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan	
9 . 1 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Jembatan	
9 . 1 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
9 . 1 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
9 . 1 . 7 . 03 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	
9 . 1 . 7 . 03 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
9 . 1 . 7 . 03 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	

9 . 1 . 7 . 03 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
9 . 1 . 7 . 03 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	
9 . 1 . 7 . 03 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Air	
9 . 1 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
9 . 1 . 7 . 03 . 12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	
9 . 1 . 7 . 03 . 13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
9 . 1 . 7 . 03 . 14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
9 . 1 . 7 . 03 . 15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	
9 . 1 . 7 . 03 . 18	Beban Penyusutan Instalasi Gas	
9 . 1 . 7 . 03 . 19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	
9 . 1 . 7 . 03 . 20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	
9 . 1 . 7 . 03 . 21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	
9 . 1 . 7 . 03 . 23	Beban Penyusutan Jaringan Gas	
9 . 1 . 7 . 04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
9 . 1 . 7 . 04 . 01	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
9 . 1 . 7 . 04 . 02	Dstàààààààà..	
9 . 1 . 7 . 05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	
9 . 1 . 7 . 05 . 01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	
9 . 1 . 7 . 05 . 02	Dstàààààààà..	
9 . 1 . 7 . 06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
9 . 1 . 7 . 06 . 01	Beban Amortisasi Goodwill	
9 . 1 . 7 . 06 . 02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	
9 . 1 . 7 . 06 . 03	Beban Amortisasi Hak Cipta	
9 . 1 . 7 . 06 . 04	Beban Amortisasi Paten	
9 . 1 . 7 . 06 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	D
9 . 1 . 8 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	
9 . 1 . 8 . 01 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	
9 . 1 . 8 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	
9 . 1 . 8 . 01 . 03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
9 . 1 . 8 . 01 . 04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
9 . 1 . 8 . 01 . 05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
9 . 1 . 8 . 01 . 06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	
9 . 1 . 8 . 01 . 09	Beban Penyisihan Piutang Hibah	
9 . 1 . 8 . 01 . 10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 11	Dst.....	
9 . 1 . 8 . 02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
9 . 1 . 8 . 02 . 01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
9 . 1 . 8 . 02 . 02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
9 . 1 . 8 . 02 . 03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
9 . 1 . 8 . 02 . 04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9 . 1 . 8 . 02 . 05	Beban Penyisihan Uang Muka	
9 . 1 . 8 . 02 . 06	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	
9 . 1 . 8 . 02 . 07	Beban Penyisihan Piutang Tagihan Pihak Ketiga	
9 . 1 . 8 . 03	Beban Penyisihan Bagian LancarTagihan Tuntutan Ganti Kerugian	
9 . 1 . 8 . 03 . 01	Beban Penyisihan Bagian LancarTagihan Tuntutan Ganti Kerugian	
9 . 1 . 8 . 04	Beban Penyisihan TGR	
9 . 1 . 8 . 04 . 01	Beban Penyisihan TGR	
9 . 1 . 8 . 05	Beban Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
9 . 1 . 8 . 05 . 01	Beban Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	D

9 . 1 . 9 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9 . 1 . 9 . 01 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9 . 1 . 9 . 02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9 . 1 . 9 . 02 . 01	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9 . 1 . 9 . 03	Beban Lain-lain	
9 . 1 . 9 . 03 . 01	Beban Lain-lain	
9 . 1 . 10	Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Ksbupaten / Kota...	D
9 . 1 . 10 . 01	Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Ksbupaten / Kota...	
9 . 1 . 10 . 01 . 01	Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Ksbupaten / Kota...	
9 . 1 . 11	Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	D
9 . 1 . 11 . 01	Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 . 1 . 11 . 01 . 01	Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 . 1 . 12	Beban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	D
9 . 1 . 12 . 01	Beban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	
9 . 1 . 12 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	
9 . 1 . 12 . 01 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tertinggal (Alokasi Afirmasi) - LO	
9 . 2	BEBAN TRANSFER	
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	D
9 . 2 . 1 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 1 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 1 . 01 . 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 . 2 . 1 . 01 . 03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D
9 . 2 . 2 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9 . 2 . 2 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D
9 . 2 . 3 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 3 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 3 . 02 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D
9 . 2 . 4 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO	
9 . 2 . 4 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO	
9 . 2 . 4 . 01 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tertinggal (Alokasi Afirmasi) - LO	
9 . 2 . 4 . 02		
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D
9 . 2 . 5 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 . 2 . 5 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	D
9 . 2 . 6 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 . 2 . 6 . 01 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	

9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D
9 . 3 . 1 . 01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 07	Dst	
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D
9 . 3 . 2 . 01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 08	Dst	
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D
9 . 3 . 3 . 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	
9 . 3 . 3 . 01 . 02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 04	Dst	
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	D
9 . 4 . 1 . 01	Beban Luar Biasa	
9 . 4 . 1 . 01 . 01	Beban Tak Terduga	
9 . 4 . 1 . 01 . 02	Beban Bencana Alam	
9 . 4 . 1 . 01 . 03	Beban Luar Biasa Lainnya	

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN